

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Dengan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, Administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama yang pada saat berada dibawah Departemen Agama ditangani oleh Direktorat, setelah bergabung dengan Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal. Perubahan ini tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, financial maupun sarana prasarana.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989), Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Jambi pada saat itu masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Jambi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mewilayahi 6 Pengadilan Agama yaitu :

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Muara Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 yang ditanda tangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid, terbentuklah Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Muara Sabak yang kemudian disusul dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 tanggal 28 Agustus 2002 terbentuklah pula Pengadilan Agama Muara Tebo dan Pengadilan Agama Sengeti.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi sekarang ini wilayah hukumnya meliputi 10 (sepuluh) wilayah kota dan kabupaten di propinsi Jambi, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jambi
2. Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Pengadilan Agama Kuala Tungkal
4. Pengadilan Agama Muara Bungo
5. Pengadilan Agama Bangko
6. Pengadilan Agama Sungai Penuh
7. Pengadilan Agama Muara Sabak
8. Pengadilan Agama Sarolangun
9. Pengadilan Agama Muara Tebo
10. Pengadilan Agama Sengeti

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia, yaitu

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

C. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Penyusunan Renstra harus mengikuti Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2006, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Renstra merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan, dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Manajemen Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Sasaran :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan
Sasaran :
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI & PELAYANAN PUBLIK

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

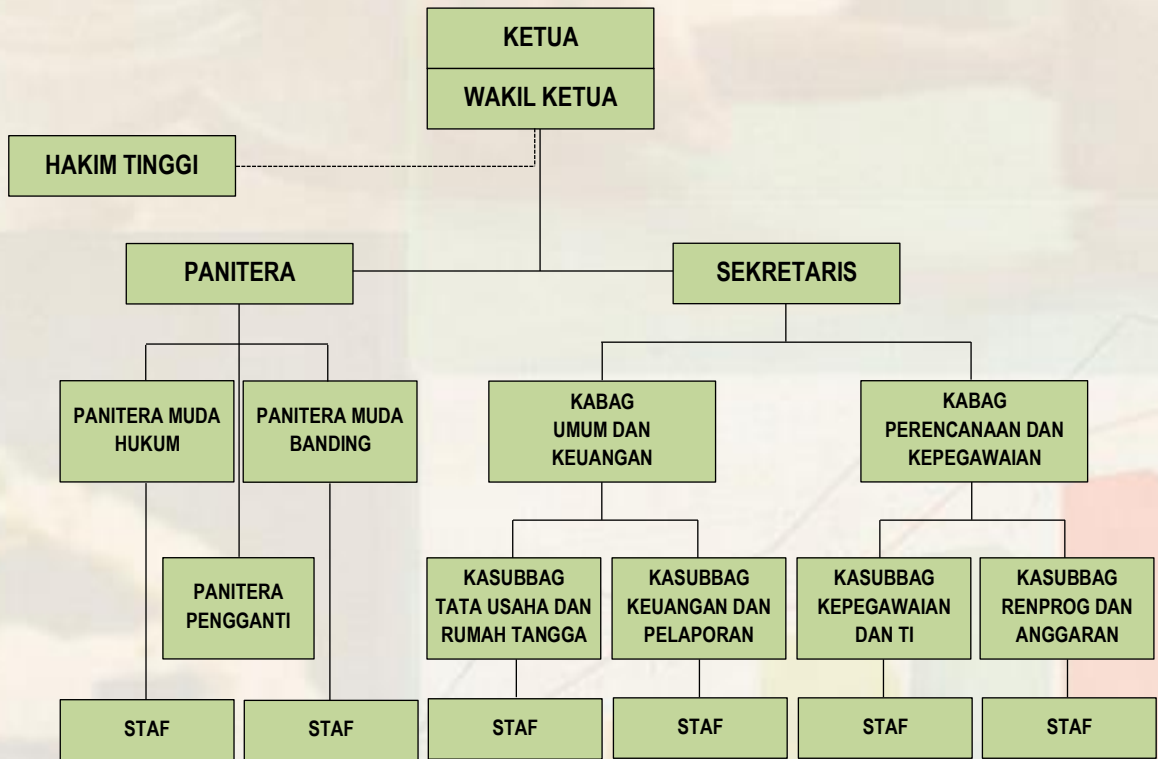
Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan tersebut baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, diperlukan sumber daya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Struktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam sebuah organisasi tak terkecuali seperti di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

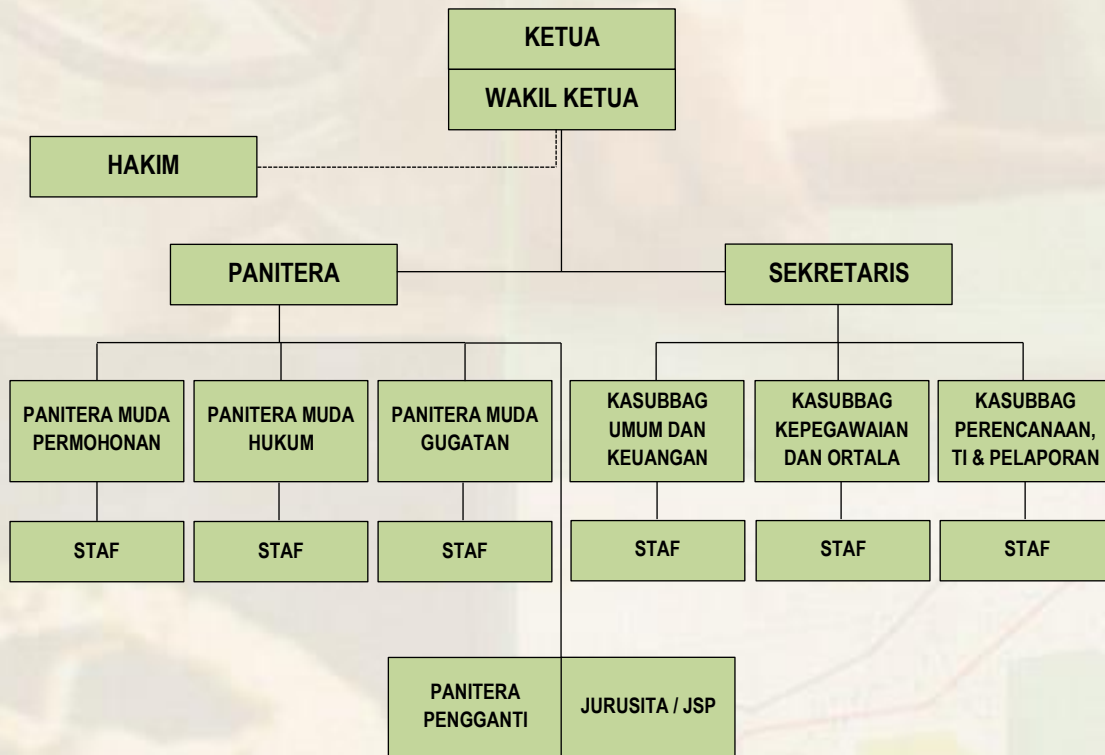
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama



Reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya merupakan salah satu upaya untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini dapat berjalan secara optimal ketika didukung oleh aparatur Mahkamah Agung RI yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam bekerja. Komitmen dan kompetensi aparatur Mahkamah Agung dapat diwujudkan dalam kinerja yang baik, jika mereka didukung oleh sistem kerja yang baik dan didukung oleh semua komponen organisasi. Sinkronisasi dan integralisasi suatu mekanisme kerja penting dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, maka metoda, tata kerja, dan prosedur kerja penting dirumuskan dalam suatu prosedur yang baku melalui standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, untuk mengevaluasi kinerja dari aparatur Mahkamah Agung RI diperlukan juga penilaian kinerja yang dapat memberi petunjuk bagi pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier pegawai.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan
2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan
3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan

SOP yang sudah ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas- tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon II, III, dan IV, Pejabat Fungsional, Panitera Pengganti sampai kepada staf. Secara garis besar SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdapat pada Matrik SOP berikut ini :

Tabel 2.1
Matrik SOP Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TERDIRI DARI	KETERANGAN
I	TEKNIS PTA JAMBI			
1	Ketua / Wakil Ketua	31	1. SOP Pengembangan Pegawai 2. Izin Belajar dan Tugas Belajar 3. SOP Pengelolaan Data Pegawai 4. SOP Pengelolaan KARPEG, KARTU Pensiun, BPJS, KARIS/KARSU 5. SOP Pengajuan Cuti Pegawai 6. SOP Pengelolaan KP Teknis dan Non Teknis 7. SOP Absensi 8. SOP KGB 9. SOP Ijin Perkawinan dan ijin Perceraian 10. SOP Pensiun 11. SOP Penilaian Pegawai 12. SOP Pendelegasian Wewenang 13. SOP Pemberian Penghargaan 14. SOP LHKPN/LHKASN 15. SOP Penyusunan Rencana Program Anggaran 16. SOP SAKIP	

			17.SOP Penyusunan Laporan 18.SOP Tata naskah surat dinas 19.SOP Pengelolaan Arsip 20.SOP Pemeliharaan lingkungan dan keamanan 21.SOP Kehumasan 22.SOP Penetapan Majelis Hakim 23.SOP Laporan Data Perkara 24.SOP Laporan Bulanan dan Tahunan Perkara Tk. Pertama 25.SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat 26.SOP Penyelesaian Perkara 27.SOP Penunjukan Panitera Pengganti 28.SOP Penetapan hari Sidang 29.SOP Pemeriksaan Perkara 30.SOP Putusan Perkara Banding 31.SOP Sidang Lanjutan Setelah Putusan Sela 32.SOP Pemberkasan Minutasi 33.SOP Pelayanan Prodeo pada tingkat banding	
2	Hakim Tinggi	9	1. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 2. SOP Penetapan hari Sidang 3. SOP Pemeriksaan Perkara 4. SOP Putusan Perkara Banding 5. SOP Sidang Lanjutan Setelah Putusan Sela 6. SOP Pemberkasan Minutasi 7. SOP Pelayanan Prodeo pada tingkat banding 8. SOP Minutasi sehari 9. SOP Penyelesaian Perkara	
3	Panitera	8	1. SOP Penerimaan Perkara Banding 2. SOP Penetapan Majelis Hakim 3. SOP Penunjukan Panitera Pengganti 4. SOP Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan Sela 5. SOP Pengembalian Berkas Bundel A dan Pengiriman salinan putusan 6. SOP Laporan Data Perkara 7. SOP Laporan Bulanan dan Tahunan Perkara Tk. Pertama 8. SOP Penyelesaian Perkara	
4	Panitera Muda Hukum	9	1. SOP Pemeriksaan Perkara 2. SOP Putusan Perkara Banding 3. SOP Sidang Lanjutan setelah putusan sela 4. SOP Pemberkasan minutasi 5. SOP Pengarsipan berkas perkara 6. SOP Laporan data perkara 7. SOP Laporan Bulanan dan Tahunan Perkara Tk. Pertama	

			8. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat 9. SOP Layanan Informasi berbasis TI	
5	Panitera Muda Banding	10	1. SOP Layanan Informasi berbasis TI 2. SOP Penerimaan Perkara Banding 3. SOP Penetapan hari sidang 4. SOP Pemeriksaan Perkara 5. SOP Putusan Perkara Banding 6. SOP Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan Sela 7. SOP Sidang Lanjutan setelah putusansela 8. SOP Pemberkasan minutasi 9. SOP Pengembalian Berkas Bundel A dan Pengiriman salinan putusan 10. SOP Pengarsipan berkas perkara	
6	Panitera Pengganti	8	1. SOP Penetapan hari Sidang 2. SOP Pemeriksaan Perkara 3. SOP Putusan Perkara Banding 4. SOP Sidang Lanjutan setelah putusansela 5. SOP Pemberkasan minutasi 6. SOP Pengarsipan berkas perkara 7. SOP Penyelesaian Perkara 8. SOP Minutasi 1 hari	
II	NON TEKNIS PTA JAMBI			
1	Sekretaris	29	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan pegawai 3. SOP ijin belajar dan tugas belajar 4. SOP Pengelolaan data pegawai 5. SOP Karpeg, Kartu pension, BPJS, Karis/karsu 6. SOP absensi 7. SOP cuti 8. SOP KP Teknis dan Non Teknis 9. SOP KGB 10. SOP Ijin Perkawinan dan Perceraian 11. SOP Pensiun 12. SOP Penilaian Pegawai 13. SOP Pendelegasian wewenang 14. SOP Penghargaan 15. SOP LHKPN/LHKASN 16. SOP Rencana Program dan Anggaran 17. SOP SAKIP 18. SOP Laporan 19. SOP Tata naskah surat dinas 20. SOP Pengelolaan Arsip 21. SOP Penataan Persediaan 22. SOP Pemeliharaan lingkungan dan keamanan	

			23.SOP kehumasan 24.SOP Pengelolaan sarana dan Prasarana 25.SOP Pencairan anggaran 26.SOP PNBP 27.SOP Aset 28.SOP Laporan Keuangan 29.SOP Pengelolaan website dan TI	
2	Kabag Umum dan Keuangan	10	1. SOP Tata naskah surat dinas 2. SOP Pengelolaan Arsip 3. SOP Penataan Persediaan 4. SOP Pemeliharaan lingkungan dan keamanan 5. SOP kehumasan 6. SOP Pengelolaan sarana dan Prasarana 7. SOP Pencairan anggaran 8. SOP PNBP 9. SOP Aset 10.SOP Laporan Keuangan	
3	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	19	1. SOP Rencana Program dan Anggaran 2. SOP SAKIP 3. SOP Laporan 4. SOP Pelaksanaan Orientasi dan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 5. SOP Pengembangan pegawai 6. SOP ijin belajar dan tugas belajar 7. SOP Pengelolaan data pegawai 8. SOP Karpeg, Kartu pensiun, BPJS, Karis/karsu 9. SOP absensi 10.SOP cuti 11.SOP KP Teknis dan Non Teknis 12.SOP KGB 13.SOP Ijin Perkawinan dan Perceraian 14.SOP Pensiun 15.SOP Penilaian Pegawai 16.SOP Pendelegasian wewenang 17.SOP Penghargaan 18.SOP LHKPN/LHKASN 19.SOP Website dan TI	
4	Kasub bag Tata Usaha Dan Rumah tangga	5	1. SOP Tata naskah surat dinas 2. SOP Pengelolaan Arsip 3. SOP Penataan Persediaan 4. SOP Pemeliharaan lingkungan dan keamanan 5. SOP kehumasan	
5	Kasub bag Keuangan Dan Pelaporan	5	1. SOP Pengelolaan sarana dan Prasarana 2. SOP Pencairan anggaran 3. SOP PNBP	

			4. SOP Aset 5. SOP Laporan Keuangan	
6	Kasub bag Kepegawaian dan TI	16	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan pegawai 3. SOP ijin belajar dan tugas belajar 4. SOP Pengelolaan data pegawai 5. SOP Karpeg, Kartu pension, BPJS, Karis/karsu 6. SOP absensi 7. SOP cuti 8. SOP KP Teknis dan Non Teknis 9. SOP KGB 10. SOP Ijin Perkawinan dan Perceraian 11. SOP Pensiun 12. SOP Penilaian Pegawai 13. SOP Pendelegasian wewenang 14. SOP Penghargaan 15. SOP LHKPN/LHKASN 16. SOP Website dan TI	
7	Kasub bag Rencana Program dan Anggaran	3	1. SOP Rencana Program dan Anggaran 2. SOP SAKIP 3. SOP Laporan	
8	Staf sub. bag Tata Usaha Dan Rumah tangga	5	1. SOP Tata naskah surat dinas 2. SOP Pengelolaan Arsip 3. SOP Penataan Persediaan 4. SOP Pemeliharaan lingkungan dan keamanan 5. SOP kehumasan	
9	Staf sub. Bag Keuangan Dan Pelaporan	5	1. SOP Pengelolaan sarana dan Prasarana 2. SOP Pencairan anggaran 3. SOP PNBPN 4. SOP Aset 5. SOP Laporan Keuangan	
10	Staf sub. Bag Kepegawaian & TI	16	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab 2. SOP Pengembangan pegawai 3. SOP ijin belajar dan tugas belajar 4. SOP Pengelolaan data pegawai 5. SOP Karpeg, Kartu pensiun, BPJS, Karis/karsu 6. SOP absensi 7. SOP cuti 8. SOP KP Teknis dan Non Teknis 9. SOP KGB 10. SOP Ijin Perkawinan dan Perceraian 11. SOP Pensiun 12. SOP Penilaian Pegawai 13. SOP Pendelegasian wewenang	

			14.SOP Penghargaan 15.SOP LHKPN/LHKASN 16.SOP Website dan TI	
11	Staf Sub. Bag Rencana Program dan anggaran	3	1. SOP Rencana Program dan Anggaran 2. SOP SAKIP 3. SOP Laporan	
12	Staf panmud Banding	10	1. SOP Layanan Informasi berbasis IT 2. SOP Penerimaan Perkara Banding 3. SOP Pemeriksaan Perkara 4. SOP Putusan Perkara Banding 5. SOP Pengiriman Berkas dan salinan putusan Sela 6. SOP Pemberkasan Minutasi 7. SOP Pengembalian berkas bundel A dan pengiriman salinan putusan 8. SOP Laporan data perkara 9. SOP Pengelolaan biaya proses perkara 10.SOP Pengelolaan biaya ATK Perkara	
13	Staf panmud hukum	7	1. SOP Layanan Informasi berbasis IT 2. SOP Pemberkasan Minutasi 3. SOP Publikasi putusan 4. SOP Pengarsipan berkas perkara 5. SOP Laporan Data Perkara 6. SOP Laporan bulanan dan tahunan perkara tingkat pertama 7. SOP Penangan pengaduan masyarakat	

Standard Operational Procedure tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya.

1. Eselon I

Tugas Eselon II dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I melalui Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya. Tugas pejabat eselon II juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

2. Eselon III

Pejabat eselon III dalam SOP merupakan pejabat di tingkat middle. Tugas utama dari pejabat eselon III adalah menganalisa usulan pejabat eselon IV atas resiko, benefit dan faktor legal dari setiap keputusan yang akan dibuat.

3. Eselon IV

Pejabat eselon IV dalam SOP bertugas menyusun data-data yang diberikan oleh staf untuk kemudian dikompilasi menjadi satu bentuk berkas.

4. Staf

Pejabat Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari pejabat eselon di atasnya.

5. Fungsional

SOP Kepaniteraan terkait dengan perkara melibatkan banyak pihak, dimulai dari staf kepaniteraan, para Panitera Pengganti, Para Panitera Muda, Panitera, Para hakim Tinggi, sampai pada Wakil ketua dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana yang tuang dalam pasal 20 diatas, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeris Sipil yang terdiri atas unsur SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan Prilaku Kerja.

Melaksanakan amanat pasal 12, pasal 20 undang-undang no 43 tahun 1999 dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan telah melakukan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mengevaluasi

kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pimpinan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Jambi dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil terutama yang berkaitan dengan:

1. Kebijakan perencanaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (job design).
2. Pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya.
3. Pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil.
4. Pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, promosi, mutasi atau kompensasi lainnya.

Dalam sistem penilaian prestasi kerja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi, setiap pegawai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. Sasaran Kerja Pegawai disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan Kegiatan Tugas Jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai. Setiap Kegiatan Tugas Jabatan yang akan dilaksanakan, target sebagai hasil kerja yang harus diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/output, kualitas, waktu dan dapat disertai biaya. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.

Tabel 2.2
Matriks SKP Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.	Ketua	34	
2	Dr. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H	Wakil Ketua	17	
3	Drs. M. Nasir Daud	Hakim Tinggi	14	
4	Drs. H. Lazuardi S., M.H.I	Hakim Tinggi	12	
5	Drs. H. Paskinar Said	Hakim Tinggi	12	
6	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.	Hakim Tinggi	14	
7	Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.	Hakim Tinggi	16	
8	Drs. H. Mas'ud	Hakim Tinggi	13	
9	Drs. H. Mayskurin Hamid, S.H., M.S.I.	Hakim Tinggi	16	
10	Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	15	
11	Drs. H. S. Syekhan Al Jufri	Hakim Tinggi	14	
12	Drs. H. Alimurhawas	Panitera	17	
13	Sahril, S.H., M.H.	Panmud Banding	13	
14	Henry Hanafi, S.H., M.H.	Panmud Hukum	20	
15	Faizal, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	10	
16	Baharuddin Jalil, S.H.	Panitera Pengganti	9	
17	Hj. Yahidah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	10	
18	Drs. Namlis, M.H.	Panitera Pengganti	10	
19	Mawardi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	10	
20	Drs. Zubir Ishak, M.H.	Panitera Pengganti	10	
21	Drs. Aidil Mujahid	Panitera Pengganti	11	
22	Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum, M.H.	Panitera Pengganti	9	
23	Nur Mulyanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	10	
24	Dian Sari Wulandari, S.Ag.	Panitera Pengganti	10	
25	H. Idris Latif, S.H., M.H.	Sekretaris	13	
26	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum & Keuangan	9	
27	Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.	Kabag Perencanaan & Kepeg.	16	
28	H. Zainal Abidin, S.Ag, M.H.	Kasub Bag TU & Rumah Tangga	22	
29	Syapruddin, S.Ag.	Kasub Bag. Renc. Prog. & Anggaran	18	
30	Budi Barliansyah, S.E.	Kasub Bag Keu & Pelaporan	16	
31	Muthiya Sari, S.Sos., M.H.	Kasub Bag Kepegawaian & TI	24	
32	Tri Wahyuni, S.Kom.	Staf Panmud Banding	18	
33	Wiwit Rahmadhani, S.E.	Staf TU & RT	17	

34	Rini Hafsari Susilawati, S.E.	Staf	12	
35	Ahmad Ghufran, S.E., M.M.	Staf Kepegawaian dan TI	11	
36	M. Ukbah Rizal, S. Kom	Staf Renprog & Anggaran	13	
37	Imron Hidayat, S.Kom	Staf Keuangan & Pelaporan	10	
38	Widianingsih, A.Md.	Staf Panmud Hukum	12	
39	Gusmi Yanti Fitriani, S.H.	Staf Keuangan & Pelaporan	11	
40	Panca Indriatari, A.Md.	Staf Kepegawaian dan TI	13	
41	Vina Amrina	Staf Panmud Hukum	12	
42	Rovel Rinaldi, S.H.I, M.H.	Staf TU & RT	7	
43	Enita	Staf Renprog & Anggaran	19	

Tabel 2.3
Matriks SKP Pengadilan Agama Jambi

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Drs. MUJAHIDIN, M.H.	Ketua	38	
2	Drs. SYAHRIAL ANAS, S.H.	Wakil Ketua	18	
3	Drs. MUKHTAR ALI MS	Hakim Utama Muda	13	
4	Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.	Hakim Utama Muda	14	
5	Dra. ISMIYATI	Hakim Utama Muda	14	
6	Drs. ADWAR, S.H.	Hakim Madya Utama	12	
7	NURMADI RASYID, S.H, M.H.	Hakim Madya Utama	13	
8	Drs. H. MUKHTAR, S.H, M.H	Hakim Utama Muda	13	
9	Drs. H. NIZAMUDDIN, S.H	Hakim Utama Muda	12	
10	Drs. M. ADNAN YUS, S.H	Hakim Utama Muda	12	
11	Drs. M. NASIR, M.H	Hakim Utama Muda	9	
12	Dra. ZULFIARTI	Hakim Madya Utama	12	
13	Drs. SYEKH	Hakim Madya Utama	13	
14	Dra. ERLIS, S.H	Hakim Madya Utama	12	
15	Drs. H. M. Ridwan Ustha E. M.H	Hakim Utama Muda	12	
16	Drs. HELMI, M.Hum	Hakim Utama Muda	12	
17	Drs. H. DJAHIDIN	Hakim Madya Utama	13	
18	Drs. H.Efrizal, S.H., M.H	Hakim Utama Muda	13	
19	Dra. RASMIATI	Hakim Utama Muda	12	
20	Drs. AGUSTI	Hakim Utama Muda	12	
21	Drs. KAMARDI, S.H., M.A	Hakim Madya Utama	12	
22	Drs. FIRDAUS, M.A.	Hakim Madya Utama	13	
23	Drs. H. RUSDI, M.H.	Panitera	36	

24	SAPI'I, S. Ag., M.H.	Sekretaris	25	
25	RAUDHAH RAHMAN, S.H, M.Hum	Panitera Muda Hukum	12	
26	RA. FADHILAH, SH, MH	Panitera Muda Gugatan	9	
27	AHMAD TARMIZI, S.H.,M.H.	Panitera Muda Permohonan	8	
28	NISKA ZANITA, SEI	Kasubbag Umum dan Keuangan	22	
29	MUHAMMADIYAH, S.Th.I.,M.H.I	Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	24	
30	ABDUL RACHMAN, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	10	
31	Drs. PITIR RAMLI, MEI	Panitera Pengganti	8	
32	SAID ALWI, S.H.	Panitera Pengganti	7	
33	Drs.HAMBALI, M. EI	Panitera Pengganti	8	
34	Dra. KHOIRIYAH, M.H.	Panitera Pengganti	8	
35	ABAS,BA	Panitera Pengganti	8	
36	YUSNITA, S.H.	Panitera Pengganti	7	
37	Dra. ROSNI, M.H.	Panitera Pengganti	7	
38	ZURYATI, S.H.I.	Panitera Pengganti	7	
39	ROSMALA, S.Ag., M.H.I	Panitera Pengganti	7	
40	Hj. SAYANG, S.H.I., M.H.I	Panitera Pengganti	7	
41	SUPRIYATI, S.E., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	7	
42	NIZOMUDDIN	Jurusita	7	
43	AZMAN	Jurusita	5	
44	AHMAD YAHYA, S.H., M.H.	Jurusita	5	
45	KHOLILAYNY, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti	5	
46	ROZA MIFTAHUL JANNAH, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti	46	
47	DESY FERAWATY, S.E., M.H.	Jurusita Pengganti	47	
48	USFIA WIRNA, S.H.	Jurusita Pengganti	48	
49	MISDIONO	Jurusita Pengganti	49	
50	MIRFAT, S.T., M.H.	Jurusita Pengganti	50	
51	FENNY YULI YANTI, S.H.	Jurusita Pengganti	51	
52	AFRA DESMIARLEN, S.H.I., M.H.	Jurusita Pengganti	14	

Tabel 2.4
Matriks SKP Pengadilan Agama Sengeti

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Drs. H. Abdan Khubban.,SH,MH	Ketua	15	
2	Dra. Emaneli.,MH	Hakim	17	
3	Dra. Siti Patimah., M.Sy	Hakim	17	

4	H. Rijlan Hasanuddin, Lc	Hakim	17	
5	Rahmatullah Ramadhan D, S.HI	Hakim	13	
6	Yunizar Hidayati, S.HI	Hakim	12	
7	Apit Farid, S.HI	Hakim	14	
8	Mhd. Syukri Adly, SHI., MA	Hakim	12	
9	Drs. Idwal Maris, MH	Panitera	24	
10	Yudhistira Adi Pinto.,SE.,MH	Sekretaris	14	
11	Drs. Said Hasan. A.,MH	Panmud Gugatan	8	
12	Romi Herusman Saputra, S.HI., M.H.	Panmud Hukum	8	
13	Siti Hairiah, S.H.I.	Panmud Permohonan	8	
14	H.Solikun,S.SosI., .S.H., M.H.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	13	
15	Rindom Ridona, S.HI, M.H.	Kasubbag Perencanaan ,TI & Pelaporan	12	
16	Angga Setiawan Rahardi, SH.MH	Kasubbag Umum & Keuangan	15	
17	Arief Mustaqim,S.EI.,M.E.Sy	Panitera Pengganti	6	
18	Umarriad Bafadhal.,SH.,MH	Panitera Pengganti	6	
19	Siti Azizah., S.HI	Panitera Pengganti	6	
20	Rosda Maryanti, S.E.Sy.	Panitera Pengganti	5	
21	Adityawarman, SH.I.,MH	Panitera Pengganti	5	
22	Ismiatun, S.Pd.I, MH	Panitera Pengganti	5	
23	Haristo.,SH	Panitera Pengganti	5	
24	Tabri, S.Ag.SH	Jurusita	8	
25	Arsil Hadi, S.H.,MH	Jurusita	11	
26	Imran, A.Md	Jurusita	9	
27	M. Faizal, A.Md	Jurusita	6	
28	Hj. Susila Eka Ningsih	Jurusita Pengganti	7	
29	Elin Marlina	Jurusita Pengganti	16	
30	Umi Ulfah Tarigan, SH.MH	Jurusita Pengganti	12	

Tabel 2.5
Matriks SKP Pengadilan Agama Muara Sabak

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H	KETUA	41	
2	Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H	WAKIL KETUA	13	
3	Ayeb Soleh, S.H.I	HAKIM	13	
4	Dakardi, S.Ag., M.Sy	PANITERA	23	
5	Marzuki, S.H	SEKRETARIS	16	

6	Muhlashin, S.Ag	PANMUD HUKUM	11	
7	Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H	PANMUD PERMOHONAN	8	
8	Sanusi Pane, S.H.I., M.H	PANMUD GUGATAN	9	
9	Suhardi, S.Kom	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	14	
10	Dedi Arizal, S.E	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	12	
11	Fadli, S.H., M.H	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	14	
12	Siti Rawdiah Sari, S.H	PANITERA PENGGANTI	6	
13	Sunarti, S.H	PANITERA PENGGANTI	6	
14	Ya'akub, S.H., M.H	PANITERA PENGGANTI	6	
15	Lestri Handayani, S.H., M.H	PANITERA PENGGANTI	6	
16	Syirwan Syahyalam	JURU SITA	7	
17	Arif Sulistiyo	JURU SITA	7	
18	Surya Darni S, S.E	FUNGSIONAL UMUM/STAF	14	
19	Affi Nurul Laily, S.H.I	CPNS/CAKIM	12	
20	Rizki Gusfaroza, S.H	CPNS/CAKIM	12	

Tabel 2.6
Matriks SKP Pengadilan Agama Kuala Tungkal

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	IMAM MASDUQI S.Ag.,S.H., M.HES	Ketua	41	
2	SUSPAWATI, S.Ag	Wakil Ketua	31	
3	WISRI, S.Ag	Hakim	15	
4	ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.H.I., M.H.	Hakim	19	
5	ILYAS, S.H.	Panitera	43	
6	RADEN MUHAMMAD SYAFII, S.Ag	Sekretaris	38	
7	M. HABIBULLAH, S.E.I.,M.H.	Panmud Hukum	22	
8	ARIFIN, SH.,M.H.	Panmud Gugatan	9	
9	DARLAN.S.Sos.I	Kasubbag Perenc, TI dan Pelaporan	23	
10	SRI KANDI, S.Ag.,M.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	18	
11	MUHAMMAD ZAINUDDIN,S.H.,M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	28	
12	ERWAN, SH	Panitera Pengganti	16	
13	ASMUNI.S.Sos.I	Jurusita	13	
14	YULIZAR SY, S.Pd., M.H.	Jurusita	10	
15	KHAIRUN NISA	Jurusita	13	
16	MUHAMMAD HELMI	Jurusita	15	

17	MISRANI	Bendahara Pengeluaran	14	
16	ARI AMBRIANTI, S.H.	Cpns/Cakim	12	
17	PENO RAHMA DINATA, S.H.	Cpns/Cakim	12	
18	MISRANI	Staf Gol II/a	23	

Tabel 2.7
Matriks SKP Pengadilan Agama Muara Bulian

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1.	Askonsri, S.Ag., M.H.I.	Ketua	35	
2.	Dra. Mulyamah, M.H.	Hakim	12	
3.	Ahyar Siddiq, S.El, M.HI	Hakim	12	
4.	Sri Rizki Dwi Putri, SH	Hakim	15	
5.	Lanka Asmar, S.HI, MH	Hakim	12	
6.	Nur Chotimah, S.H.I., M.A.	Hakim	14	
7.	Darda Aristo, S.H.I.	Hakim	12	
8.	Risnatul Aini, S.HI	Hakim	13	
9.	Taufik Rahayu Syam, S.HI, M.S.I	Hakim	12	
10.	Hudori, S.Ag, MH	Panitera	20	
11.	Dra. Nur'aini	Sekretaris	24	
12.	Nurismar Muis, BA	Panitera Muda Permohonan	14	
13.	Musdarni, BA	Panitera Muda Gugatan	19	
14.	Akhmad Fauzi, S.HI, MH	Panitera Muda Hukum	21	
15.	Novriandi, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	14	
16.	Astrie Wahyuni, S.Kom, M.S.I	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	23	
17.	Aliyanto, S.Kom, M.S.I	Kasubbag Umum dan Keuangan	21	
18.	Mustainah, S.Ag, MH	Panitera Pengganti	13	
19.	Septi Rianti, SH	Panitera Pengganti	14	
20.	Kamal Shaputra, S.H.	Panitera Pengganti	14	
21.	Pirdaus, S.HI	Panitera Pengganti	13	
22.	Mulyadi, SH	Panitera Pengganti	13	
23.	Nasarudin	Jurusita	10	
24.	Sri Maryenti	Jurusita	10	

Tabel 2.8
Matriks SKP Pengadiln Agama Sarolangun

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag	Ketua	37	
2	Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua	12	
3	Zakaria Ansori, S.H.I.,M.H.	Hakim	12	
4	Anita Kirana.S.H.I.	Panitera	22	
5	Faisal Munawwar, S.T	Sekretaris	17	
6	Dra. Hj. Zainunah	Wakil Panitera	12	
7	Arsad.Lc	Panmud Hukum	12	
8	Dra. Zuriah	Panmud Gugatan	9	
9	Ibnu Hajar, BA	Panmud Permohonan	8	
10	Yusri	Jurusita	9	
11	Joni Iswandi, S.H.I.	Kasubag Umum dan Keuangan	24	
12	Husaini, S.Kom.	Kasubag IT	18	
13	Doni Dirmansyah, S.H	Kasubag UP	20	
14	Muhammad Tahrir	Jurusita Pengganti	8	
15	Ardita Septianindi, A.Md.	Staf	9	
16	Windi Mariastuti, S.Sy.	CPNS	8	
17	Nanda Devi Krisna Putri, S.H.	CPNS	8	

Tabel 2.9
Matriks SKP Pengadiln Agama Muara Tebo

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Hj. Baihna, S.Ag.,M.H	Ketua	41	
2	Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy	Wakil Ketua	18	
3	Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I	Hakim	16	
4	Rusydi Bidawan, S.H.I.,M.H	Hakim	18	
	Izzami Thaufiq, S.H.,M.H	Panitera	18	
5	Rajani, S.Ag.,M.E.Sy	Sekretaris	18	
6	Widarli	Wakil Panite	16	
7	Nur Amri, S.H	Panmud Hukum	11	
8	Ahmad Khumaidi, S.H.I	Panmud Gugatan	8	
9	M. Yusuf, S.H.I	Panmud Permohonan	8	
10	Jufri Azhari, S.Sy	Kasubbag Umum dan Keuangan	8	

11	Yudi Mardiansyah, S.Kom	Kasubbag IT, Perenc dan Pelaporan	8	
12	Fauzana, S.E	Plt. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	8	
13	Riduansyah	Jurusita	8	
14	Agustiar	Jurusita	8	
15	Yuli Hartini	Jurusita Pengganti		

Tabel 2.10
Matriks SKP Pengadilan Agama Muara Bungo

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Dra. Hj. Asmidar	Ketua	40	
2	Ahmad Patrawan, S.H.I.	Hakim	27	
3	Dani Ramdani, S.H.I., M.H.	Hakim	14	
4	Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.	Hakim	26	
5	Ghozi, S.Ag., M.A.	Panitera	34	
6	Hoiriah, S.Ag., M.H	Sekretaris	18	
7	Tet Tazani, S. Ag.	Wakil Panitera	16	
8	Hazizah, S.Sy.	Panitera Muda Hukum	7	
9	Rani Irvan, S.H.	Panitera Muda Permohonan	7	
10	Lara Harnita, S.H.I.	Panitera Muda Gugatan	26	
11	Asnawi, S.H.	Panitera Pengganti	7	
12	Zulpitri	Jurusita	10	
13	Herlin Qomara Sari, S.E.	Kasubbag Kepeg dan Ortala	14	
14	Deri Praja Kusuma, S.Kom., M.S.I.	Kasubbag Keu dan Umum	20	
15	Maksor, S. Pd.i.	It. Kasubbag Perenc, TI, & Pelaporan	13	
16	Ahmad Farhan Subhi, S.Sy	CPNS/Cakim	12	

Tabel 2.11
Matriks SKP Pengadilan Agama Bangko

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Drs. Mahmud Dongoran, M.H	Ketua	31	
2	Dra. Ermiwati, B	Hakim	11	
3	Dra. Hj. Mardiah, S.h., M.H	Hakim	14	
4	Drs. Maimuddin	Hakim	18	
5	Milda Sukmawati, S.H.I	Hakim	13	

6	Drs. Dahkir A	Panitera	25	
6	Arlis, S.H.I	Wakil Panitera	10	
7	Zari Wardana, S.H.I., M.E.Sy	Panitera Muda Hukum	11	
8	Sri Wahyuni, S.H.I	Panitera Muda Gugatan	15	
9	Ikhwanul karim, BA	Panitera Muda Permohonan	7	
10	Husni Jayadi, S.Ag., M.H	Panitera Pengganti	11	
11	Witman, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	11	
12	Samardin, S.H.I.	Jurusita	4	
13	Kiki Wardiana, S.T	Jurusita	14	
14	Syafrianto, S.Ag., M.M	Sekretaris	19	
15	M. Ramli, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	20	
16	Azhar Amir, S.H., M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	24	
17	Sutopo, S.Kom., M.H	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	13	

Tabel 2.12
Matriks SKP Pengadilan Agama Sungai Penuh

NO	SASARAN KERJA PEGAWAI		JUMLAH KEGIATAN THN 2018	KET
	NAMA	JABATAN		
1	Ikhsanuddin, SH	Ketua	18	
2	Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H.	Hakim	14	
3	Genius Virades, S.H.	Hakim	11	
4	Drs. Auza'i, M.H	Panitera	17	
5	Arlis, S.Ag	Wakil Panitera	15	
6	Drs. Khairuddin	Panmud Hukum	9	
7	Erwan Pani, SH	Panmud Gugatan	8	
8	Noprizal, S.H.I.	Panum Permohonan	8	
9	Halimah, S.Ag	Panitera Pengganti	12	
10	Saadah, S.Ag.	Panitera Pengganti	12	
11	Zulpikar, S.H.I., M.H.I	Panitera Pengganti	12	
12	Maidariati, S.H.	Sekretaris	19	
13	Lasminar, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	23	
14	Ulil Amri, S.H.I., M.A.	Kasubbag Perenc. IT, dan Pelaporan	8	
15	Egi Mochammad Mugni Fahrozi, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	22	
16	Buhari	Jurusita	4	
17	Ade Winarta, S.E	Jurusita	11	
18	Harum Sahar, S.E.	Fungsional Umum	13	

19	M. Khusnul Khuluq, S.Sy	Cakim	12	
19	Buhari	Jurusita	11	
20	Ade Winarta, SE	Jurusita	11	
21	Egi MMF, S.Kom	Staf Kepegawaian	17	
22	Siti Fatimah Sugiran, A.Md	Staf Keuangan	14	

B. Pelayanan Publik yang Prima

a. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan bermutu dari lembaga peradilan menjadi salah satu pemicu Pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI berlomba-lomba mendapatkan pengakuan untuk kualitas pelayanan peradilan yang diberikan kepada pihak berperkara. Untuk itu, Mahkamah Agung berupaya menstandarisasikan sekaligus meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan-pengadilan melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM).

Di lingkungan Peradilan Agama, konsep akreditasi penjaminan mutu telah dijalankan dan beberapa kali mengalami metamorfosis standar akreditasi dengan ruang lingkup meliputi administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan, administrasi kepaniteraan dan administrasi sarana prasarana. Penyelenggaraan program ini melibatkan tiga pihak, yaitu aparaturnya Pengadilan selaku implementator sistem penjaminan mutu, aparaturnya Pengadilan Tingkat Banding selaku mentor sekaligus assesor, dan Komite APM Ditjen Badan Peradilan Agama selaku akreditor.

Mekanisme pemberian akreditasi kepada Pengadilan Agama dimulai dari penerapan sistem penjaminan mutu dimana Pengadilan Agama mengadakan penilaian internal dan rapat tinjauan manajemen. Selanjutnya, dilakukan penilaian eksternal oleh Tim Penilai Eksternal yang terdiri dari asesor dan penamping asesor. Penilaian Eksternal APM dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk memastikan dan mengukur penerapan sistem penjaminan mutu di Pengadilan Agama
2. Untuk mengetahui capaian Pengadilan Agama yang menerapkan sistem penjaminan mutu.

3. Untuk memberikan usulan-usulan perbaikan kepada Pengadilan Agama yang menerapkan sistem penjaminan mutu demi peningkatan kinerja dan pelayanan.

Hasil penilaian itu kemudian diverifikasi oleh Tim SAPM Ditjen Badilag, sebelum akhirnya diserahkan kepada Komite APM Ditjen Badan Peradilan Agama untuk diputuskan Pengadilan Agama mana yang layak memperoleh sertifikat akreditasi. Ada lima kemungkinan hasil akhir penilaian, yaitu A (86%-100%), B (71%-85%), C (51%-70%), D (31%-50%) dan Tidak Terakreditasi (0-30%). Komite APM Ditjen Badilag hanya memberikan akreditasi terhadap Pengadilan Agama yang capaiannya A (Excellent) dan B (Baik).

Pada tahun 2018, 10 (sepuluh) Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada tahun sebelumnya terdapat 3 (tiga) Pengadilan Agama yang melaksanakan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yakni Pengadilan Agama Muara Bulian kelas IB, Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas II dan Pengadilan Agama Muara Bungo kelas II dan seluruhnya memperoleh nilai tertinggi yaitu A (Excellent). Sedangkan di tahun 2018 ini ada 7 (tujuh) Pengadilan Agama yakni: Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, Pengadilan Agama Sengeti kelas IB, Pengadilan Agama Bangko Kelas IB, Pengadilan Agama Sungai Penuh kelas II, Pengadilan Agama Muara Sabak Kelas II, Pengadilan Agama Sarolangun Kelas II dan Pengadilan Agama Muara Tebo kelas II.

Asesmen Eksternal Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama tahun 2018 dilaksanakan dua Asesor yang berbeda untuk asesmen pertama dilaksanakan tanggal 9-19 Mei 2018 oleh Tim Asesmen Eksternal Badilag yakni Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Bangko dan Pengadilan Agama Jambi. Tim ini di ketuai oleh Wilcopin Alwintara Damanik, S.Kom dari Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan Anggota Pendamping Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M. Hum (Wakil Ketua PTA Jambi), H. Idris Latif, S.H., M.H (Sekretaris PTA Jambi), Widianingsih W, A. Md (Staf Kepanitraan PTA Jambi) dan Rovel Rinaldi, SHI., MH (Staf Kesekretariatan PTA Jambi). Adapun hasil dari penilaian dari ketiga Pengadilan Agama ini yaitu :

1. Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB mendapatkan hasil A (Excellent)

2. Pengadilan Agama Jambi Kelas IA mendapatkan hasil A (Excellent)
3. Pengadilan Agama Bangko Kelas IB mendapatkan hasil A (Excellent)

Sedangkan asesment kedua eksternal akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama dilaksanakan di Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Sungai Penuh dan Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 20-31 Mei 2018. Tim ini di ketuai oleh Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M sebagai Lead Asessor dengan anggota yang terdiri dari H. Idris Latif, S.H., M.H, Yudisthira Adi Pinto, S.E., M.H., Drs. Aidil Mujahid, Ahmad Ghufuran, SE, MM, Widya Ningsih, A.Md dan di dampingi oleh Tim PTA Jambi oleh Drs. Jumaani Soleh dan Rovel Rinaldi, S.H.I., M.H. Adapun hasil dari penilaian dari keempat Pengadilan Agama ini yaitu :

1. Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II mendapatkan hasil A (Excellent)
2. Pengadilan Agama Sarolangun Kelas II mendapatkan hasil A (Excellent)
3. Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II mendapatkan hasil A (Excellent)
4. Pengadilan Agama Muara Sabak Kelas II mendapatkan hasil B (Baik)

Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 7 (tujuh) Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada tanggal 13 Juli 2018 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Sedangkan untuk Tingkat Banding, Assemen Eksternal Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilakukan oleh Tim Asesmen Eksternal Ditjen Badan Peradilan Agama. Tim Asesmen Eksternal Badilag yakni : Dr. Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H., Drs. H. Andi Kurniawan, M.M. dan Akhmad Sahid, S.H. dilangsungkan pada tanggal 27-29 Agustus 2018. Adapun hasil dari penilaian dari Tim Asesment tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jambi mendapatkan nilai A (Excellent). Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada tanggal 10 September 2018 di Bali.

Dengan telah terakreditasinya seluruh Peradilan Agama di wilayah Jambi mengisyaratkan bahwa Peradilan Agama siap memberikan pelayanan baik dan bermutu di Wilayah Provinsi Jambi. Tantangan berikutnya adalah

bagaimana pengadilan dapat mempertahankan standar tersebut bahkan meningkatkan bagi yang masih bernilai B (Baik) dapat meningkatkan lagi hingga mencapai standar tertinggi. Untuk itu, dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), maka setiap tahun dilakukan Assesment Surveillance. Di tahun 2018, telah dilaksanakan surveillance pertama terhadap 3 (tiga) Pengadilan Agama yang telah melakukan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu pada Tahun 2017 yakni Pengadilan Agama Muara Bulian kelas IB, Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas II dan Pengadilan Agama Muara Bungo kelas II pada tanggal 12-17 November 2018. Tim Assesmen Surveillance diketuai oleh H. Idris Latif, S.H., M.H. (Sekretaris PTA Jambi) dan beranggotakan Yudhistira Adi Pinto, S.E., M.H, Ahmad Ghufon, S.E., M.M., M. Ukbah Rizal, S. Kom dan Rovel Rinaldi, S.H.I., M.H. Adapun hasil penilaian dari ketiga Pengadilan Agama ini bahwa Pengadilan Agama Muara Bulian, Pengadilan Agama Muara Bungo dan Pengadilan Agama Kuala Tungkal berhasil mempertahankan nilai A (Excellent).

b. Posbakum

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah menyediakan Pos Pelayanan Hukum untuk masyarakat pencari Keadilan yang tidak mampu ada 4 PA, yaitu Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, Pengadilan Agama Bangko Kelas IB, Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB, dan Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas II yang mana 4 PA tersebut telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum di wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 2.13
Pagu, Realisasi, dan Nama Lembaga Posbakum

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Jam Layanan	Nama Lembaga Bantuan Hukum
1	PA Jambi Kelas IA	62.400.000	62.400.000	-	624	Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Cabang Jambi
2	PA Kuala Tungkal	48.000.000	48.000.000	-	480	Muyarno, S.H. & Rekan
3	PA Bangko Kelas IB	48.000.000	48.000.000	-	480	STAI Syekh Maulana Qori Bangko
4	PA Sengeti Kelas IB	45.400.000	45.400.000	-	454	Paham Jambi

c. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama wilayah PTA Jambi telah melaksanakan salah satu program Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan untuk membantu masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan sidang keliling dan sidang terpadu, dari 10 PA diwilayah Jambi ada 3 PA yang telah melaksanakan sidang terpadu yaitu Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Pengadilan Agama Muara Sabak dan Pengadilan Agama Muara Bungo dan telah bekerja sama dengan instansi Pemerintah Daerah terkait di satker tersebut, sedangkan untuk kegiatan sidang di luar gedung dari 10 PA diwilayah Jambi hanya 9 PA yang telah melaksanakannya dan mempunyai anggaran DIPA di tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14
Pagu dan Realisasi Sidang Keliling
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara
1	PA Jambi	-	-	-	-	-
2	PA Muara Bulian	95.000.000,-	95.000.000,-	-	81	88
3	PA Kuala Tungkal	80.000.000,-	55.200.000,-	24.800.000,-	35	51
4	PA Muara Bungo	45.000.000,-	44.700.000,-	300.000,-	44	109
5	PA Bangko	50.000.000,-	50.000.000,-	-	43	90
6	PA Sungai Penuh	20.000.000,-	20.000.000,-	-	19	40
7	PA Muara Sabak	20.000.000,-	19.800.000,-	200.000,-	21	70
8	PA Sarolangun	20.000.000,-	20.000.000,-	-	19	16
9	PA Sengeti	63.000.000,-	63.000.000,-	-	40	77
10	PA Muara Tebo	75.000.000,-	75.000.000,-	-	25	128

Pada tahun 2018 juga terdapat Pengadilan Agama yang melaksanakan pelayanan terpadu yaitu Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang mendapat anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tempat sidang yang ditetapkan yaitu Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ulu. Perkara yang ditangani pada pelayanan terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kuala Tungkal sebanyak 524 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.15
Pagu dan Realisasi Pelayanan Terpadu
pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal

No	Tempat Sidang (Kecamatan)	Jumlah Perkara	Jumlah				Pagu	Realisasi	Sisa
			Kabul	Tolak	Gugur	Cabut			
1	Bram Itam	221	198	7	16	-	266.037.500	246.112.000	19.925.000
2	Betara	256	236	2	16	2			
3	Tungkal Ulu	47	34	-	13	-			

d. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2018 akses masyarakat miskin atau tidak mampu terus difasilitasi oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu program prioritas Mahkamah Agung dan juga prioritas Negara. Dibawah payung hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam SEMA NOMOR 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum salah satunya bantuan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo). Adapun untuk wilayah PTA Jambi di tiap satker telah ada anggaran khusus untuk program pembebasan biaya perkara dan telah melaksanakan program tersebut dengan jumlah perkara Prodeo yang di tangani berjumlah 177 perkara prodeo.

Tabel 2.16
Pagu dan Realisasi Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	Jumlah Perkara yang diselesaikan
1	PA Jambi	17.500.000,-	17.500.000,-	-	50
2	PA Muara Bulian	12.000.000,-	11.607.000,-	393.000,-	22
3	PA Kuala Tungkal	5.250.000,-	4.900.000,-	350.000,-	14
4	PA Muara Bungo	3.500.000,-	3.500.000,-	-	10
5	PA Bangko	3.500.000,-	3.500.000,-	-	10
6	PA Sungai Penuh	12.000.000,-	12.000.000,-	-	20
7	PA Muara Sabak	2.800.000,-	2.800.000,-	-	8
8	PA Sarolangun	2.800.000,-	2.800.000,-	-	8
9	PA Sengeti	8.750.000,-	8.750.000,-	-	25
10	PA Muara Tebo	3.500.000,-	3.500.000,-	-	10

e. Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana

dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system), Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mengimplementasikannya, hal itu dibuktikan dengan adanya ruang pelayanan informasi dan pengaduan.

Adapun jumlah pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2018 sebanyak 16 layanan, yang terdiri dari 11 layanan konsultasi hukum dan 5 layanan informasi perkara banding. Untuk layanan pengaduan tahun 2018 sebanyak 1 kasus pengaduan.

Sedangkan untuk layanan meja informasi dan pengaduan tahun 2018 di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.17
Layanan Meja Informasi dan Pengaduan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

No	Satuan Kerja	Layanan Informasi	Layanan Pengaduan	Keterangan
1	PA Jambi	1258	2	
2	PA Muara Bulian	590	0	
3	PA Kuala Tungkal	1076	0	
4	PA Muara Bungo	511	0	
5	PA Bangko	438	0	
6	PA Muara Sabak	130	0	
7	PA Sarolangun	372	0	
8	PA Sungai Penuh	573	0	
9	PA Sengeti	45	0	
10	PA Muara Tebo	1030	0	
	Jumlah	6023	2	

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pokok bagi satu organisasi dan sangat menentukan bagi keberhasilan tujuan bagi organisasi tersebut. Peran sumber daya manusia (SDM) bila dikaitkan dengan lembaga peradilan merupakan lembaga yang terhormat, dengan tujuan pokok menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 merupakan peranan yang tidak saja penting secara organisasi tetapi juga menyangkut faktor-faktor filosofis dan sosiologis. Secara umum, sumber daya manusia (SDM) peradilan dapat dikategorikan pada dua kelompok. Kelompok pertama adalah sumber daya manusia teknis yudisial yang terdiri dari Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Adapun kelompok kedua adalah sumber daya manusia non teknis yudisial yang terdiri dari Sekretaris, Kabag, Kasubbag dan para pegawai umumnya.

Untuk tahun 2018 sumber daya manusia teknis yudisial dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi terdiri dari Hakim Tingkat Banding berjumlah 11 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Tingkat Pertama kelas IA berjumlah 19 (Sembilan belas) Orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Hakim Tingkat Pertama Kelas IB berjumlah 19 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Hakim Tingkat Pertama kelas II berjumlah 21 (dua puluh satu) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Panitera Dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi Panitera berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Panitera Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Muda dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjumlah 32 (tigapuluh dua) orang termasuk Panitera Muda Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Pengganti dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjumlah 44 (empat puluh empat) orang, Jurusita/Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Jurusita berjumlah 19 (sembilan belas) orang sedangkan Jurusita Pengganti berjumlah 12 (dua belas) orang.

Sedangkan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ditahun 2018 terdiri dari Sekretaris berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Kepala Bagian 2(dua) orang, Kepala Sub Bagian berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang. Sedangkan Fungsional Umum/Staf sejumlah 19 (Sembilan belas) orang.

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak melaksanakan perkrutan Pegawai baru. Perekrutan atau penerimaan pegawai baru dilingkungan pengadilan diambil alih atau dilaksanakan langsung oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih membutuhkan sumber daya manusia terutama di bidang kesekretariatan.

Tabel 3.1
Matrik SDM
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Wilayah Hukum
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	PTA JAMBI	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	9 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Panitera Muda Banding	1 Orang
		Panitera Muda Hukum	1 Orang
		Panitera Pengganti	10 Orang
		Kabag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, Program dan Anggaran	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian dan TI	1 Orang
		Kasubag Keuangan dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	1 Orang
		Staf / Fungsional Umum	13 Orang
2	PA Jambi	Ketua	1 Orang
	Kelas IA	Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	17 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang

		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panitera Pengganti	11 Orang
		Juru Sita	3 Orang
		Jurusita Pengganti	8 Orang
3	PA Sengeti Kelas IB	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	Tidak Ada/Mutasi ke PA Tiga Raksa
		Hakim	5 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panitera Pengganti	7 Orang
		Juru Sita	4 Orang
		Jurusita Pengganti	3 Orang
4	PA Muara Bulian Kelas IB	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	Pejabat Kosong
		Hakim	7 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	5 Orang
		Juru Sita	2 Orang
5	PA Bangko Kelas IB	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	Pejabat Kosong
		Hakim	4 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang

		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	2 Orang
		Juru Sita	2 Orang
6	PA Muara Sabak Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	4 Orang
		Juru Sita	2 Orang
		Staf / Fungsional Umum	1 Orang
		CPNS Cakim	2 Orang
7	PA Muara Bungo Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	Tidak Ada / Mutasi ke PA Muara Sabak
		Hakim	3 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Tidak Ada/Mutasi menjadi PP ke PA Sengeti
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	1 Orang
		Juru Sita	1 Orang
		Staf / Fungsional Umum	1 Orang
		CPNS Cakim	1 Orang
8	PA Kuala Tungkal Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	3 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1 Orang

		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	Tidak Ada/Sudah Pensiun
		Panitera Pengganti	1 Orang
		Juru Sita	4 Orang
		Staf / Fungsional Umum	1 Orang
		CPNS Cakim	2 Orang
9	PA Sungai Penuh Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	Tidak Ada / Mutasi ke PA Sibuhuan
		Hakim	2 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	3 Orang
		Juru Sita	2 Orang
		Staf / Fungsional Umum	1 Orang
		CPNS Cakim	1 Orang
10	PA Sarolangun Kelas II	Ketua	1 Orang
		Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1 Orang
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	Pejabat Kosong
		Juru Sita	1 Orang
		Staf / Fungsional Umum	2 Orang
		CPNS Cakim	2 Orang

11	PA Muara Tebo	Ketua	1 Orang
	Kelas II	Wakil Ketua	1 Orang
		Hakim	1 Orang
		Panitera	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Wakil Panitera	1 Orang
		Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat Kosong
		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Panmud Hukum	1 Orang
		Panmud Gugatan	1 Orang
		Panmud Permohonan	1 Orang
		Panitera Pengganti	Pejabat Kosong
		Juru Sita	2 Orang
		Jurusita Pengganti	1 Orang
		Staf / Fungsional Umum	1 Orang
		CPNS Cakim	2 Orang

a. Mutasi

- Mutasi Jabatan

Mutasi atau transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain dibidang yang berbeda pada suatu Lembaga atau organisasi. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan.

Mutasi Jabatan dalam tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama telah diproses dan telah terealisasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Pegawai yang Mutasi

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M. Hum.	19550816.198103.1.004	IV/e	Wakil Ketua PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Pontianak
2	Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.	19580705.198603.1.001	IV/e	Wakil Ketua PTA Bengkulu	Wakil Ketua PTA Jambi
3	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.	19560226.198303.1.001	IV/e	Ketua PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Semarang
4	Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.	19530919.198103.1.005	IV/e	Wakil Ketua PTA Gorontalo	Ketua PTA Jambi
5	Drs. H. Muslim, S.H., M.H.	19580222.198803.1.001	IV/e	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Banten
6	Drs. Kamardi, S.H., M.A.	19641121.199203.1.003	IV/c	Hakim PA Bengkulu	Hakim PA Jambi
7	Drs. Agusti	19540830.198203.1.003	IV/c	Hakim PA Bangkinang	Hakim PA Jambi
8	Dra. Rasmiati	19581012.199003.2.003	IV/c	Hakim PA Pariaman	Hakim PA Jambi
9	Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.	19620924.199202.1.001	IV/b	Ketua PA Muara Tebo	Hakim PA Tiga Raksa
10	Hj. Baihna, S.Ag., M.H.	19740720.200012.2.003	III/d	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal	Ketua PA Muara Tebo
11	Drs. Yenisuryadi, M.H.	19671225.199403.1.006	IV/b	Ketua PA Sarolangun	Hakim PA Batam
12	Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.	19750827.200604.1.003	III/d	Wakil Ketua PA Sarolangun	Ketua PA Sarolangun
13	Dra. Siti Patimah, M.Sy.	19581219.199403.2.002	IV/b	Wakil Ketua PA Muara Sabak	Hakim PA Sengeti
14	Wisri, S.Ag	19610217.199202.1.001	IV/a	Hakim PA Sungai Penuh	Hakim PA Kuala Tungkal
15	Darul Fadli, S.H.I., M.A.	19810222.200904.1.002	III/c	Hakim PA Muara Sabak	Hakim PA Ketapang
16	Drs. Mahmud Dongoran, M.H.	19670514.199303.1.005	IV/c	Wakil Ketua PA Bangko	Ketua PA Bangko
17	Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.	19750712.200502.1.001	III/d	Wakil Ketua PA Muara Tebo	Ketua PA Sekayu
18	Rinaldi M, S.H.I.	19830102.200904.1.008	III/c	Hakim PA Muara Bungo	Hakim PA Talu
19	Drs. Alimurhawas	19590320.199203.1.002	IV/c	Panitera PTA Ambon	Panitera PTA Jambi
20	A. Syarkawi, S.Ag., M.H.	19750408.200312.1.003	IV/a	Wakil Ketua PA Sungai Penuh	Ketua PA Sibuhuan
21	Ermanita Alfiah, S.H., M.H.	19830318.200704.2.001	III/c	Hakim PA Sarolangun	Hakim PA Mukomuko
22	Muhammad Hidayatullah, S.H.I	19760927.200912.1.001	III/c	Hakim PA Kuala Tungkal	Hakim PA Bintuhan
23	Ramadanar, S.H.I., M.H.	19820624.200604.2.005	III/d	Hakim PA Sungai Penuh	Hakim PA Tais
24	Ridho Afriandedy, S.H.I., LC., MH.	19830425.200912.1.006	III/c	Hakim PA Sungai Penuh	Hakim PA Mesuji
25	Senen, S.Ag., M.H.	19700515.199703.1.002	IV/b	Ketua PA Kuala Tungkal	Ketua PA Ngamprah
26	Sulistianingti Wibawanty, S.H., M.H.	19770224.200012.2.001	IV/a	Hakim PA Muara Sabak	Wakil Ketua PA Muara Sabak
27	Suspawati, S.Ag	19760710.200112.2.003	IV/a	Hakim PA Muara Bulian	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal
28	Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy.	19721231.200112.1.007	IV/a	Hakim PA Sawahlunto	Wakil Ketua PA Muara Tebo
29	Moehammad Fathnan, S.Ag., M.H.I	19721224.199803.1.003	IV/b	Hakim PA Madiun	Wakil Ketua PA Sarolangun
30	H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.	19760106.200112.1.002	IV/a	Hakim PA Sarolangun	Wakil Ketua PA Ujung Tanjung
31	Hj. Mursyidatul Jannah, SH	19580108.198003.2.001	III/d	Panitera Pengganti PTA Jambi	Panitera Pengganti PTA Pontianak
32	Drs. H. Lazuardi S, M.H.I.	19540301.198403.1.001	IV/e	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru	Hakim Tinggi PTA Jambi
33	Drs. H. Paskinar Said	19540605.198303.1.009	IV/d	Hakim Tinggi PTA Padang	Hakim Tinggi PTA Jambi
34	Drs. Abd. Rahman Usman, S.H.	19551231.198203.1.081	IV/e	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah

35	Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.	19551003.198403.1.001	IV/e	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Bandung
36	Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.	19541014.198103.1.006	IV/e	Hakim Tinggi PTA Jambi	Hakim Tinggi PTA Bengkulu
37	Elvin Nailana, S.H., M.H.	19690227.198803.1.002	IV/c	Ketua PA Muara Bulian	Wakil Ketua PA Samarinda
38	Askonsri, S.Ag., M.H.I.	19661110.199603.1.001	IV/c	Wakil Ketua PA Kalianda	Ketua PA Muara Bulian
39	Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A.	19631008.198903.2.003	IV/d	Hakim PA Padang	Wakil Ketua PA Jambi
40	Drs. H. Mukhlis	19601105.199103.1.003	IV/c	Hakim PA Batam	Hakim PA Jambi
41	Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.	19770627.200604.1.002	III/d	Hakim PA Muara Tebo	Hakim PA Kuala Tungkal
42	Drs. Mukhtar Ali Ms	19541127.198003.1.005	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Padang
43	M. Rifai, S.H.I., M.H.I.	19810729.200704.1.001	III/c	Hakim PA Pandan	Hakim PA Muara Tebo
44	Yunizar Hidayati, S.H.I	19810610.200704.2.001	III/c	Hakim PA Sengeti	Hakim PA Kayu Agung
45	Drs. M. Nasir, M.H.	19600303.199003.1.002	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Jakarta Timur
46	Drs. Wazirman	19550514.198003.1.006	IV/d	Hakim PA Cimahi	Hakim PA Jambi
47	Drs. H. Sugian Noor, S.H.	19560517.198303.1.007	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Martapura
48	Drs. M. Adnan Yus, S.H.	19550807.198303.1.008	IV/d	Hakim PA Jambi	Hakim PA Medan

- Mutasi Pangkat

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara. Selain dari pada itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdianannya. Oleh karena itu kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan tepat waktunya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Pegawai yang Naik Pangkat

NO	NAMA	NIP	GOL		UNIT KERJA	PERIODE
			LAMA	BARU		
1	Yudhistira Adi Pinto, S.E., M.H.	19811016.200604.1.005	III/c	III/d	PA Sengeti	April
2	Jufri Azhari, S.Sy.	19880302.201403.1.001	III/a	III/b	PA Muara Tebo	April
3	Sutopo, S.Kom., M.H.	19811102.200912.1.002	III/b	III/c	PA Bangko	April
4	Astrie Wahyuni, S.Kom	19850605.200912.2.001	III/b	III/c	PA Muara Bulian	April
5	Herlin Qomara Sari, S.E	19860927.200912.2.005	III/b	III/c	PA Muara Bungo	April
6	Budi Barliansyah, S.E	19790525.200604.1.006	III/c	III/d	PTA Jambi	April
7	Muthiya Sari, S.Sos., M.H.	19790829.200604.2.004	III/c	III/d	PTA Jambi	April
8	M. Zainuddin, S.H., M.H.	19750313.200012.1.001	III/b	III/c	PA Kuala Tungkal	April
9	Rindom Ridona, S.H.I., M.H.	19870521.200604.1.002	III/b	III/c	PA Sengeti	April
10	Ulil Amri, S.H.I	19780430.200912.1.001	III/b	III/c	PA Sungai Penuh	April
11	Syafrianto, S.Ag	19780619.200112.1.004	III/d	IV/a	PA Bangko	April
12	Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H	19541014.198103.1.005	IV/d	IV/e	PTA Jambi	April

13	Rijlan Hasanuddin, Lc	19780312.200604.1.004	III/c	III/d	PA Sengeti	April
14	Apit Farid, S.H.I	19810707.200912.1.002	III/c	III/d	PA Sengeti	April
15	Mhd. Syukri Adly, S.H.I.	19840526.201101.1.007	III/b	III/c	PA Sengeti	April
16	Suspawati, S.Ag	19760710.200112.2.003	III/d	IV/a	PA Bangko	April
17	Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.	19780706.200604.1.005	III/c	III/d	PA Sarolangun	April
18	Ramadanar, S.H.I., M.H.I.	19820624.200604.2.005	III/c	III/d	PA Sungai Penuh	April
19	Ridho Afriandedy, S.H.I	19830425.200912.1.006	III/b	III/c	PA Sungai Penuh	April
20	Ayeb Soleh, S.H.I	19750131.200604.1.002	III/c	III/d	PA Muara Sabak	April
21	M. Hidayatullah, S.H.I	19760927.200912.1.001	III/b	III/c	PA Kuala Tungkal	April
22	Rusydi Bidawan, S.H.I	19800421.200912.1.002	III/b	III/c	PA Muara Tebo	April
23	Asrori Amin, S.H.I	19770627.200604.1.002	III/c	III/d	PA Muara Tebo	April
24	Raudhah Rachman, S.H., M.Hum	19771209.200112.2.002	III/d	IV/a	PA Jambi	April
25	Zari Wardana, S.H.I	19830913.200912.1.004	III/c	III/d	PA Bangko	April
26	Witman, S.H.I	19810607.200912.1.004	III/c	III/d	PA Bangko	April
27	M. Habibullah, S.E.I	19840113.200912.1.003	III/b	III/c	PA Kuala Tungkal	April
28	Zulpikar, S.H.I., M.H.I.	19791010.200912.1.002	III/b	III/c	PA Muara Bungo	April
29	Ahmad Khumaidi, S.H.I.	19860408.200912.1.005	III/b	III/c	PA Muara Tebo	April
30	Umi Ulfah Tarigan, S.H.	19890131.201403.2.001	III/a	III/b	PA Sengeti	April
31	Samardin, S.H.I	19611231.199403.1.022	III/c	III/d	PA Bangko	April
32	Arif Sulisty	19840820.200912.1.004	II/b	II/c	PA Muara Sabak	April
33	Riduansyah	19840325.200912.1.005	II/b	II/c	PA Muara Tebo	April
34	Rini Hafsari S, S.E., M.H.	19820121.200912.2.001	III/b	III/c	PTA Jambi	April
35	Ahmad Ghufuran, S.E., M.M.	19840311.201101.1.005	III/b	III/c	PTA Jambi	April
36	M. Ukbah Rizal, S.Kom.	19850214.200912.1.002	III/b	III/c	PTA Jambi	April
37	Panca Indriatari, A.Md	19841106.200912.2.006	II/d	III/a	PTA Jambi	April
38	Widianingsih W, A. Md	19871215.200912.2.001	II/d	III/a	PTA Jambi	April
39	Enita	19791023.200912.2.004	II/b	II/c	PTA Jambi	April
40	Mirfat, ST	19810605.200604.2.004	III/c	III/d	PA Jambi	April
41	Dra. Emaneli, MH	19630725.199403.2.001	IV/b	IV/c	PA Sengeti	April
42	Dra. Mulyamah, M.H	19671221.199403.2.002	IV/b	IV/c	PA Muara Bulian	April
43	Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.	19630128.199003.1.002	IV/c	IV/d	PA Jambi	April
44	Dra. Ismiyati	19550420.198203.2.001	IV/c	IV/d	PA Jambi	Oktober
45	DRs. H. Nizamuddin, S.H.	19550419.198103.1.004	IV/c	IV/d	PA Jambi	Oktober
46	Drs. M. Adnan Yus, S.H.	19550807.198303.1.008	IV/c	IV/d	PA Jambi	Oktober
47	DRs. H. Mukhtar, S.H., M.H.	19581231.198703.1.033	IV/c	IV/d	PA Jambi	Oktober
48	Drs. M. Nasir, M.H.	19600303.199003.1.002	IV/c	IV/d	PA Jambi	Oktober
49	Korik Agustian, S.Ag	19750827.200604.1.003	III/d	IV/a	PA Sarolangun	Oktober
50	Hj. Baihna, S.Ag., M.H.	19740720.200012.2.003	III/d	IV/a	PA Kuala Tungkal	Oktober
51	Saifullah Anshari, S. Ag	19750712.200502.1.001	III/d	IV/a	PA Muara Tebo	Oktober
52	Ahmad Syafruddin, S.H.I.	19810530.200805.1.001	III/c	III/d	PA Sungai Penuh	Oktober
53	Hoiriah, S.Ag	19700511.199903.2.001	III/d	IV/a	PA Muara Bungo	Oktober

54	R.A Fadhillah, S.H., M.H.	19780522.199703.2.001	III/c	III/d	PA Jambi	Oktober
55	Ya'akub, S.H., M.H.	19690916.199803.1.003	III/a	III/b	PA Muara Sabak	Oktober
56	Muhammad Tahrir	19790422.201408.1.002	II/a	II/b	PA Sarolangun	Oktober
57	Muhammadiyah, S.Th.I., M.H.I	19800816.200312.1.004	III/c	III/d	PA Jambi	Oktober
58	Azhar Amir, S.H	19841013.200604.1.004	III/c	III/d	PA Bangko	Oktober
59	Drs. Agusti	19540830.198203.1.003	IV/c	IV/d	Pa Jambi	Oktober
60	Dra. Rasmianti	19581012.199003.2.002	IV/c	IV/d	Pa Jambi	Oktober
61	Dra. Siti Patimah, M.Sy.	19581219.199403.2.002	IV/b	IV/c	PA Sengeti	Oktober

- Mutasi / Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak melaksanakan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan CPNS dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

b. Promosi

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah. Pada tahun 2018 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan Promosi jabatan untuk menempati jabatan yang belum terisi dan mengisi kekosongan jabatan yang dikarenakan adanya rotasi guna penyegaran suasana kerja.

Tabel 3.4
Daftar Pegawai yang Mendapat Promosi
Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Drs. H. Mukhlis, SH, M.Hum	19560226.198303.1.001	IV/e	Wakil Ketua PTA Mataram	Ketua PTA Jambi
2	Drs. H. Ibrahim Kardi, SH, M.Hum	19550816.198103.1.004	IV/e	Hakim Tinggi PTA Jakarta	Wakil Ketua PTA Jambi
3	Dr. H. Harun S, SH, MH	19560725.197903.1.010	IV/e	Wakil Ketua PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Surabaya
4	Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH, MH	19580705.198603.1.001	IV/d	Hakim Tinggi PTA Jambi	Wakil Ketua PTA Bengkulu
5	Drs. Asli Nasution, M.E.Sy	19620924.199202.1.001	IV/b	Wakil Ketua PA Sengeti Kelas IB	Ketua PA Ma. Tebo Kelas II
6	Saifullah Anshari, S.Ag, M.Ag	19750712.200502.1.001	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Ma. Tebo Kelas II
7	Korik Agustian, S.Ag, M.Ag	19750827.200604.1.003	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Sarolangun Kelas II
8	Hj. Baihna, S.Ag, MH	19740720.200012.2.003	III/d	HPA Sengeti Kelas IB	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II

9	Senen, S.Ag, MH	19700515.199703.1.002	IV/b	Wakil Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II	Ketua PA Kuala Tungkal Kelas II
10	Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH	19730626.199803.1.001	IV/a	HPA Sungai Penuh Kelas II	Wakil Ketua PA Tanjung Pati Kelas II
11	Dra. Ernawati, SH	19620726.199403.2.002	IV/b	Wakil Ketua PA Ma. Tebo Kelas II	Ketua PA Solok Kelas II
12	Elvin Nailana, SH, MH	19690227.198803.1.002	IV/c	Wakil Ketua PA Temanggung Kelas IB	Ketua PA Ma. Bulian Kelas IB
13	Dra. Siti Fatimah, M.Sy	19581219.199403.2.002	IV/b	HPA Bangkinan Kelas IB	Wakil Ketua PA Ma. Sabak Kelas II
14	Dra. Hj. Sy. Ummi kalsum	19581025.199402.2.001	III/d	Panmud Permohonan PA Jambi Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jambi
15	Dian Sari Wulandari, S.Ag	19750531.200112.2.002	III/d	Panitera PA Ma. Sabak Kelas II	Panitera Pengganti PTA Jambi
16	Nur Mulyanti, SH	19750418.199603.2.001	III/d	Panitera Pengganti PA Jambi Kelas IA	Panitera Pengganti PTA Jambi

c. Pensiun

Pensiun sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 10 disebutkan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi atau perusahaan agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin.

Terdapat beberapa pengertian mengenai pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Kondisi dimana seorang Pegawai Negeri Sipil tidak bekerja lagi karena berbagai hal.
2. Pensiun merupakan jaminan dihari tua dan sebagai jasa terhadap pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.
3. Berdasarkan prinsipnya, pensiun menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya dan untuk setiap pegawai negeri sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang berbentuk oleh pemerintah.

Pensiun memiliki beberapa tujuan bagi para Pegawai Negeri Sipil, antara lain :

1. Pensiun sebagai balasan jasa yang berbentuk nyata dari pemerintah kepada pegawai negeri.
2. Pensiun sebagai jaminan pada hari tua.

Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan.

Pensiun akan diberikan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :

1. Telah mencapai usia kurang lebih 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun kurang lebih selama 20 tahun.
2. Memiliki masa kerja kurang lebih 4 tahun dan oleh badan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan mengenai pengujian kesehatan para pegawai negeri, yang dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena dalam menjalankan tugas kewajiban jabatannya.
3. Diberhentikan secara hormat sebagai pegawai negeri sipil dan pada saat pemberhentiannya mereka telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

Pada tahun 2018 ini di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah ada 8 (delapan) orang yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Selain itu terdapat 3 (tiga) orang pegawai yang diusulkan pensiunnya lebih cepat sebelum mencapai batas usia pensiun (BUP) dikarenakan pegawai yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Tabel 3.5
Daftar Pegawai yang Telah Mencapai
Batas Usia Pensiun (BUP)

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	UNIT KERJA	TMT PENSIUN
1	Hartati, S.H., M.H.	19560216.198103.2.002	Pembina/ (IV/b)	Panitera Muda Banding	PTA Jambi	01-03-2018
2	Hasyimi, BA	19580309.199203.1.001	Penata/(III/c)	Panitera Pengganti	PA Sungai Penuh	01-04-2018

3	Drs. H. M. Hatta Nasution	19530607.198303.1.006	Pembina Utama Muda/ (IV/e)	Hakim	PA Jambi	01-07-2018
4	Kamal Mukhtar, S.Ag	19530711.198003.1.003	Pembina Utama Madya/ (IV/d)	Hakim	PA Jambi	01-08-2018
5	Rasidah, S.Ag	19580827.199303.2.001	Penata Tk.I/ (III/d)	Panitera Pengganti	PA Jambi	01-09-2018

d. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang Teknis Yustisial maupun Non Teknis yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengirim Hakim/Pegawai untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi lain diantaranya adalah :

Tabel 3.6
Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Ahmad Ghufuran, S.E, M.M Gusmi Yanti Fitriani, S.H	Staf Keuangan dan Pelaporan PTA Jambi	Konsolidasi dan rekonsiliasi data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.04 Semester II tahun 2017	22 - 25 Januari 2018	Nagoya Hills Hotel, Batam
2	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. H. Idris Latif, S.H., M.H. Sahril, S.H., M.H.	KPTA WKPTA Sekretaris PLT Panitera	Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 Dilaksanakan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	5 - 7 Februari 2018	Jakarta
3	Ahmad Ghufuran, S.E, M.M Gusmi Yanti Fitriani, S.H	Staf Keuangan dan Pelaporan PTA Jambi	Kegiatan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2017 UAPPAW Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Jambi	7 Februari 2018	Aula Kanwil DJPBN Provinsi Jambi
4	Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum H. Idris Latif, S.H., M.H	WKPTA Sekretaris	Bimbingan dan Pelatihan Tk. Dasar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama	8 - 11 Maret 2018	Hariss Hotel Sentraland Semarang
5	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H Drs. Mujahidin	KPTA Hakim Tinggi KPA Jambi	Seminar Nasional IKAHI tahun 2018	19 - 21 Maret 2018	Hotel Mecure Ancol, Jakarta
6	Imron Hidayat, S.Kom Kiki Wardiana, ST Muhamad Tahrir Riduansyah Usfia Wirna Ade Winarta Ahmad Ghufuran, SE, MM	Bendahara PA Kuala tungkal Bendahara PA Bangko Bendahara PA Sarolangun Bendahara PA Ma. Tebo Bendahara PA Jambi Bendahara PA Sungai Penuh Bendahara	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	25 - 29 Maret 2018	Asrama Haji Sumatera Selatan

	Deri Praja Kusuma, S.Kom Pirdaus, S.H.I Surya Darni, SE Umi Ulfah Tarigan, SH	PTA Jambi Bendahara PA Ma. Bungo Bendahara PA Ma. Bulian Bendahara PA Ma. Sabak Bendahara PA Sengeti			
7	Drs. Asri Damsy, S.H., M.H. Korik Agustian, S.Ag, M.Ag	Hakim Tinggi WKPA Sarolangun	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia	26 Maret - 10 April 2018	Pusdiklat Badan Litbang Kumdil MARI, Mega Mendung, Bogor
8	Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum	Waka PTA Jambi	Bimbingan Teknis Pembelajaran Orang Dewasa Tahun Anggaran 2018	19 - 22 April 2018	Hotel Santika Premier TMII Jakarta
9	Drs. H. S. Syekhan Aljufri Elvin Nailana, S.H., M.H	Hakim Tinggi Ketua PA. Muara Bulian	Profile Assesment dan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas IA	22 - 24 Mei 2018	Jakarta.
10	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum	Ketua PTA Jambi	Rapat Koordinasi Dalam Pencapaian Kinerja di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2018;	26 - 29 Juni 2018	Jakarta
11	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum Drs. Jumaani Soleh	Ketua PTA Jambi Kabag Umum dan Keuangan PTA Jambi	Pembinaan dan Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama	12 - 14 Juli 2018	Balikpapan Kalimantan Timur
12	Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jambi	Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan XII dan Angkatan XIII tahun 2018	4 September - 15 Desember 2018 (Sistem on- off kampus)	Balai Diklat Keagamaan di Jakarta
13	A. Syarkawi, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh	Diklat Kepemimpinan TK.IV Angkatan XVII tahun 2018	12 Agustus - Awal Desember 2018	Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor
14	Drs. Mahmud Dongoran, M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangko	Diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan XIV - XV Tahun Anggaran 2018	26 Agustus - 8 September 2018	Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor
15	Muthiya Sari, S.Sos., M.H. Panca Indriatari, A.Md	Kasubbag Kepegawaian dan TI PTA Jambi Staf Subbag Kepegawaian dan TI PTA Jambi	Sosialisasi dan Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI nomor 2 Tahun 2018	20 Agustus 2018	Aula PT. Taspen Jambi
16	Imron Hidayat, S.Kom	Staf keuangan dan Pelaporan	Monitoring & Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Akrua Tahun 2018 pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI	12 - 14 September 2018	Pengadilan Tinggi Jambi
17	Elvin Nailana, S.H, M.H	KPA Ma. Bulian	Assesment Test seleksi terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada MA RI	24 - 26 September 2018	Gedung Sekretariat MA RI, Jakarta
18	H.Idris Latif, S.H., M.H. M. Ukbah Rizal, S.Kom	Sekretaris PTA Jambi Staf Renprog	Kegiatan Penyempurnaan RKA- K/L Pagu Anggaran Tahun 2019	9 - 11 Agustus 2018	Hotel BW Luxury Jambi

	Enita, S.H	& Anggaran PTA Jambi Staf Renprog & Anggaran PTA Jambi			
19	Drs. Asri Damsy, S.H., M.H. Drs. H. S. Syekhan Al Jufri	Hakim Tinggi Hakim Tinggi	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan system pengawasan aparatur Peradilan seluruh Pengadilan Tingkat banding sewilayah sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah	27 - 29 September 2018	Jakarta
20	Imron Hidayat, S.Kom	Staf keuangan dan Pelaporan	Bimtek Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018	21 November 2018	Aula KPPN Jambi

B. Penyelesaian Perkara

a. Jumlah sisa perkara yang diputus

Tingkat Banding

Sisa perkara banding yang belum diputus pada tahun 2017 sebanyak 1 perkara, perkara banding yang diterima di tahun 2018 sebanyak 34 perkara. Sehingga perkara yang ditangani di tahun 2018 berjumlah 35 perkara. Adapun perkara yang telah diselesaikan di tahun 2018 sebanyak 33 perkara (94%) masih ada sisa 2 perkara.

Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi tahun 2018 berasal dari:

1.	PA Jambi	:	22	Perkara
2.	PA Muara Bulian	:	1	Perkara
3.	PA Kuala Tungkal	:	3	Perkara
4.	PA Muara Bungo	:	1	Perkara
5.	PA Bangko	:	1	Perkara
6.	PA Sungai Penuh	:	1	Perkara
7.	PA Muara Sabak	:	1	Perkara
8.	PA Sarolangun	:	1	Perkara
9.	PA Sengeti	:	2	Perkara
10.	PA Muara Tebo	:	1	Perkara
	Jumlah	:	34	Perkara

Perkara permohonan banding yang diputus ditahun 2018 berjumlah 33 perkara dengan rincian sebagai berikut :

1. PA Jambi
 - Cerai Talak : 4 Perkara
 - Cerai Gugat : 5 Perkara
 - Harta Bersama : 5 Perkara
 - Ekonomi Syariah : 1 Perkara
 - Kewarisan : 2 Perkara
 - Derden Verzet : 3 Perkara
 - Jumlah : 20 Perkara
2. PA Muara Bulian
 - Harta Bersama : 1 Perkara
3. PA Kuala Tungkal
 - Cerai Talak : 1 Perkara
 - Cerai Gugat : 2 Perkara
4. PA Muara Bungo
 - Cerai Talak : 1 Perkara
5. PA Bangko
 - Kewarisan : 1 Perkara
 - Cerai Gugat : 1 Perkara
6. PA Sungai Penuh
 - Cerai Talak : 1 Perkara
7. PA Muara Sabak
 - Cerai Gugat : 1 Perkara
8. PA Sarolangun
 - Cerai Talak : 1 Perkara
9. PA Sengeti
 - Cerai Gugat : 1 Perkara
 - Kewarisan : 1 Perkara
10. PA Muara Tebo
 - Kewarisan : 1 Perkara

Tingkat Pertama

Sisa perkara tingkat pertama yang belum diputus pada tahun 2017 sebanyak 721 perkara, perkara tingkat pertama yang diterima di tahun

2018 sebanyak 5913 perkara. Sehingga perkara yang ditangani di tahun 2018 berjumlah 6634 perkara. Adapun perkara yang telah diselesaikan di tahun 2018 sebanyak 5990 perkara (90,29%) masih ada sisa 644 perkara.

Tabel 3.7
Sisa Perkara Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

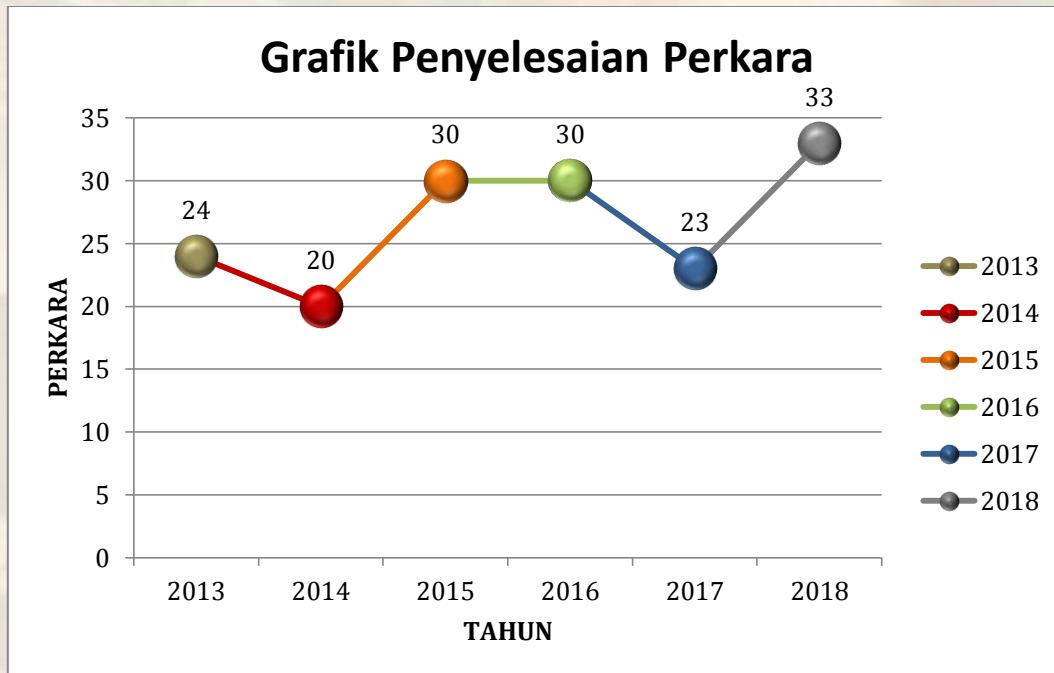
NO	SATKER	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA TAHUN INI
1	PA Jambi	169	1258	1215	212
2	PA Muara Bulian	26	474	492	8
3	PA Kuala Tungkal	85	1052	1074	63
4	PA Muara Bungo	71	553	551	73
5	PA Bangko	35	389	382	42
6	PA Sungai Penuh	94	435	474	55
7	PA Muara Sabak	57	435	420	72
8	PA Sarolangun	31	312	306	37
9	PA Sengeti	66	605	621	50
10	PA Muara Tebo	87	400	455	32
	Jumlah	721	5913	5248	644

b. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pada tahun 2018 perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi sebanyak 5763 perkara yang terdiri dari :

1. PTA Jambi : 33 Perkara
2. PA Jambi : 1168 Perkara
3. PA Muara Bulian : 474 Perkara
4. Kuala Tungkal : 1021 Perkara
5. PA Muara Bungo : 541 Perkara
6. PA Bangko : 378 Perkara
7. PA Sungai Penuh : 381 Perkara
8. PA Muara Sabak : 424 Perkara
9. PA Sarolangun : 298 Perkara
10. PA Sengeti : 615 Perkara
11. PA Muara Tebo : 430 Perkara

Grafik 3.1
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018



c. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Sepanjang tahun 2018 terdapat 5248 perkara yang putus dimana yang mengajukan banding 34 perkara, kasasi 22 perkara, dan 7 perkara PK. Adapun yang tidak mengajukan perkara banding 5214 perkara, kasasi 5226 perkara dan PK 5241 perkara.

d. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2018 pada Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi sebanyak 34 perkara dan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 669 perkara dari 713 perkara masuk yang bisa di mediasi.

e. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pengadilan Agama tidak

mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pidana anak sehingga peradilan agama tidak terdapat perkara diversi.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Demikian halnya kantor, tempat berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau administrasi yang sangat memerlukan sarana dan prasarana kantor.

Agar semua kegiatan yang berhubungan dengan perbekalan kantor baik yang bersifat administrasi maupun teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien, maka pelaksanaan atau pengelolaan sarana dan prasarana kantor harus dilakukan dengan baik.

Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan laporan sarana dan prasarana.

Tabel 3.8
Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	NOMOR POLISI	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4						
1	CAMRY V 2.5 4X2 AT B	B 1987 UAG	-	BAIK			Barang Pihak Ketiga
2	FORTUNER G LUX 2.4 4X2	B 1470 UJR	-	BAIK			Barang Pihak Ketiga
3	NEW COROLLA 1.8 GT	BH 5 MA	2006	BAIK	-	-	-
4	EVEREST	BH 1911 AZ	2013	BAIK	-	-	-
5	VIOS	BH 13	2008	BAIK	-	-	-
6	COROLLA ALTIS 1.8	BH 50 MA	2008	BAIK	RUSAK RINGAN	-	-
7	KIJANG INNOVA G	BH 1963 AZ	2011	BAIK	-	-	-
8	KIJANG INNOVA E	BH 1689 AZ	2009	BAIK	-	-	-
9	APV D	BH 161	2004		-	RUSAK BERAT	-
II	Jenis Kendaraan Roda 2						
1	MEGA PRO GLP III	BH 4434 AZ	2005	-	RUSAK RINGAN	-	-

2	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4988 AZ	2007	BAIK	-	-	-
3	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4989 AZ	2007	BAIK	-	-	-
4	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4990 AZ	2007	BAIK	-	-	-
5	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4991 AZ	2007	BAIK	-	-	-
6	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4992 AZ	2007	BAIK	-	-	-
7	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4993 AZ	2007	BAIK	-	-	-
8	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4995 AZ	2007	BAIK	-	-	-
9	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4996 AZ	2007	BAIK	-	-	-
10	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4997 AZ	2007	BAIK	-	-	-
11	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 4998 AZ	2007	BAIK	-	-	-
12	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5002 AZ	2007	BAIK	-	-	-
13	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5003 AZ	2007	BAIK	-	-	-
14	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5006 AZ	2007	BAIK	-	-	-
15	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5007 AZ	2007	BAIK	-	-	-
16	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5008 AZ	2007	BAIK	-	-	-
17	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5011 AZ	2007	BAIK	-	-	-
18	NF 125 SF (FGM-FI)	BH 5012 AZ	2007	BAIK	-	-	-

Tabel 3.9
Kendaraan Dinas Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATUAN KERJA	JENIS MODEL	TAHUN		ASAL PEROLEHAN	PENGGUNA PENANGGUNG JAWAB	KONDISI (B/RR/RB)	KET
			RAKIT	PEROLEH				
1	PA JAMBI	New Rush	2015	2015	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	4
		New Avanza	2011	2012	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
		Toyota Vios	2006	2007	MA.RI	Panitera	Baik	
		New Avanza	2011	2012	Pembelian	Sekretaris	Baik	
2	PA SENGETI	Kijang Innova	2014	2014	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	5
		Kijang Kapsul	2001	2015	PTA Jambi	Wakil Ketua	RR	
		Kijang Innova	2007	2007	MA.RI	Panitera	RR	
		Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Sekretaris	RR	
		Grend Max	2015	2015	Pemkab	Sidang Keliling	Baik	
3	PA MUARA BULIAN	Kijang Innova	2013	2013	Hibah Pem	Ketua	Baik	3
		Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Wakil Ketua	RR	
		Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
4	PA MUARA SABAK	Kijang Innova	2005	2005	MA.RI	Ketua	Baik	3
		Kijang Innova	2008	2008	MA.RI	Wakil Ketua	Baik	
		New Avanza	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	

5	PA KUALA	Pajero Sport	2010	2010	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	3
	TUNGKAL	Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Wakil Ketua	Baik	
		Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
6	PA	Toyota Rush	2015	2015	Pinjam Pakai	Ketua	Baik	3
	SAROLANGUN	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Wakil Ketua	Baik	
		Kijang Innova	2005	2006	MA.RI	Sekretaris	RR	
7	PA MUARA	Kijang Innova	2006	2007	MA.RI	Ketua	Baik	4
	TEBO	Suzuki APV	2004	2004	Pembelian	Panitera	RR	
		Kijang Innova	2017	2017	Pemkab		Baik	
		Fortuner	2008	2008	Pemkab		Baik	
8	PA MUARA	Kijang Innova	2007	2007	MA.RI	Ketua	Baik	2
	BUNGO	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Panitera	Baik	
9	PA BANGKO	Kijang Innova	2014	2014	Hibah Pem	Ketua	Baik	4
		Suzuki Ertiga	2012	2012	Pembelian	Kasubbag UK	Baik	
		New Avanza	2011	2011	Pembelian	Panitera	Baik	
		Kijang Innova	2005	2005	MA.RI	Sekretaris	Baik	
10	PA SUNGAI	Suzuki ERTIGA	2012	2012	Pembelian	Ketua	Baik	3
	PENUH	New Avanza	2011	2013	Pembelian	Panitera	Baik	
		Kijang Innova	2014	2014	MA.RI	Umum Keu	RB	

Tabel 3.10
Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	Rumah Dinas Ketua	1	BAIK	-	-	-
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	BAIK	-	-	-
3	Rumah Dinas Hakim	2	-	RUSAK RINGAN	-	-
4	Rumah Dinas Panitera	1	BAIK	-	-	-
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	BAIK	-	-	-

Tabel 3.11
Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	3	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang	1	Baik
7	Ruang Aula Utama	2	Baik
8	Ruang Tamu	2	Baik
9	Ruang Perpustakaan	1	Baik
10	Ruang Panmud Banding	1	Baik
11	Ruang Panmud Hukum	1	Baik
12	Ruang Panitera Pengganti	2	Baik
13	Ruang Kabag Umum dan Keuangan	1	Baik
14	Ruang Kasubbag TU & RT	1	Baik
15	Ruang Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	1	Baik
16	Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	1	Baik
17	Ruang Kasubbag Perenprog dan Anggaran	1	Baik
18	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan TI	1	Baik
19	Ruang Pentry	1	Baik
20	Lemari Penyimpanan	1	Baik
21	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Rusak Berat
22	Mesin Foto Copy Folio	1	Baik
23	Lemari Besi / Metal	3	Rusak Ringan
24	Lemari Kayu	54 6	Baik Rusak Berat
25	Rak Kayu	1	Baik
26	Filling Cabinet Besi	33	Baik
27	Brandkas	2	Baik
28	Mobile File	1	Baik
29	Locker	1	Baik
30	Tabung Pemadam Api	2	Baik
31	CCTV	1	Baik
32	Papan Visual / Papan Nama	3	Baik
33	White Board	2	Rusak Berat
34	Mesin Absensi	2	Baik
35	Penangkal Petir	1	Baik
36	Lampu lampu Kristal	1	Baik
37	Infocus	2	Baik

38	Meja Kerja Kayu	69 7	Baik Rusak Berat
39	Kursi Besi / Metal	273 33 13	Baik Rusak Ringan Rusak Berat
40	Kursi Kayu	44 5	Baik Rusak Ringan
41	Sice	12 1	Baik Rusak Berat
42	Meja Rapat	46	Baik
43	Meja Komputer	21 1 8	Baik Rusak Ringan Rusak Berat
44	Tempat Tidur Kayu	2	Baik
45	Meja Resepsionis	4	Baik
46	Kasur / Spring Bed	1	Baik
47	Meja Makan Kayu	6	Baik
48	Jam Mekanis	21 1	Baik Rusak Berat
49	Jam Elektronik	6	Baik
50	Mesin Penghisap Debu / Vacuum Cleaner	1	Baik
51	Mesin Cuci	1	Baik
52	Lemari Es	5	Baik
53	AC Split	37 1	Baik Rusak Berat
54	Kipas Angin	1 6	Baik Rusak Berat
55	Kompore Gas	4	Baik
56	Kompore Minyak	1	Baik
57	Rice Cooker	1	Rusak Berat
58	Tabung Gas	3	Baik
59	Rak Piring Aluminium	1	Rusak Berat
60	Televisi	13 1	Baik Rusak Berat
61	Tape Recorder	1	Baik
62	Loudspeaker	27 1	Baik Rusak Berat
63	Sound System	4	Baik
64	Microphone	15	Baik
65	Microphone Table Stand	1	Baik
66	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
67	Tiang Bendera	2	Baik
68	Kaca Hias	2	Rusak Berat
69	Dispenser	4	Baik
70	Mimbar / Podium	3	Baik
71	Palu Sidang	1	Baik
72	Handycam	1 1	Baik Rusak Berat
73	Karpet	7	Baik
74	Vertikal Blind	25	Rusak Berat

75	Kabel Roll	3	Baik
76	Asbak Tinggi	2	Baik
77	DVD Player	2	Baik
78	Kabel	6	Baik
79	Microphone / Wireless Mic	4	Baik
80	UPS	4 14	Baik Rusak Berat
81	Power Amplifier	2	Baik
82	Digital LED Running Text	1	Baik
83	Analog / Digital Receiver	5	Baik
84	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	Baik
85	Rak Peralatan	1	Baik
86	Stabilizing Amplifier	2	Baik
87	Lighting Stand Tripod	1	Baik
88	Camera Digital	1	Baik
89	Telephone (pabx)	2	Baik
90	Pesawat Telephone	4	Baik
91	Handy Talky (HT)	1	Baik
92	Generator	1	Baik
93	P.C Unit	15 16	Baik Rusak Berat
94	Laptop	18 6	Baik Rusak Berat
95	Printer	21 12	Baik Rusak Berat
96	Scanner	2	Baik
97	Server	2	Baik
98	Router	1	Baik
99	Monografi	415	Baik
100	Bahan Perpustakaan	18	Baik
101	Software	4	Baik

D. Pengelolaan Keuangan

Keuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (sources of found) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (uses of found) untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan good governance. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Di lingkungan Mahkamah Agung, pengelolaan keuangan Negara didasarkan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagai acuan dan gambaran berapa jumlah anggaran yang harus dibelanjakan dan berapa jumlah pendapatan yang ditargetkan dalam setahun. Pengelolaan DIPA dilingkungan Mahkamah Agung khususnya dibagi dalam 2 kategori yaitu DIPA Non Teknis (Umum) dan DIPA Teknis (Fungsional).

DIPA non teknis atau umum diperuntukkan bagi kebutuhan pokok satuan kerja seperti belanja rutin pegawai, belanja barang operasional dan non operasional serta belanja modal yang berada dibawah tata kelola eselon I Badan Urusan Administrasi (01). Sedangkan DIPA teknis atau fungsional diperuntukkan untuk pembiayaan satuan kerja dalam penyelesaian perkara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan serta untuk kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. DIPA teknis ini berada dibawah tata kelola eselon Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04).

a. Pengelolaan DIPA Non Teknis (Badan Urusan Administrasi)

Pengelolaan DIPA Non Teknis pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja operasional perkantoran

dan belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana. Pengelolaan DIPA non teknis ini terdiri dari beberapa program dan kegiatan utama yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk alokasi anggaran DIPA non teknis dari Badan Urusan Administrasi (01) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Total Pagu : Rp. 53.558.266.000,-
 Realisasi Anggaran 2018 : Rp. 52.493.020.955,-
 Sisa : Rp. 1.065.245.045,-

Persentase penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mencapai 98,01% dari total anggaran di dalam DIPA Tahun 2018. Adapun rincian per satuan kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATKER	PAGU	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	PTA Jambi	12.686.042.000	12.661.383.480	99,81	24.658.520	0,19
2	PA Jambi	10.956.350.000	10.739.405.251	98,02	216.944.749	1,98
3	PA Muara Bulian	4.476.187.000	4.399.220.595	98,28	76.966.405	1,72
4	PA Sengeti	4.144.591.000	4.089.690.248	98,68	54.900.752	1,32
5	PA Muara Bungo	3.010.322.000	2.806.959.140	93,24	203.362.860	6,76
6	PA Muara Tebo	2.533.827.000	2.486.581.105	98,14	47.245.895	1,86
7	PA Sarolangun	2.749.227.000	2.690.591.524	97,87	58.635.476	2,13
8	PA Bangko	2.994.149.000	2.947.066.518	98,43	47.082.482	1,57
9	PA Kuala Tungkal	3.306.605.000	3.164.267.685	95,70	142.337.315	4,30
10	PA Muara Sabak	2.810.044.000	2.714.501.097	96,60	95.542.903	3,40

11	PA Sungai Penuh	3.890.922.000	3.754.354.312	96,49	136.567.688	3,51
PTA dan PA se wilayah Jambi		53.558.266.000	52.493.020.955	98,01	1.065.245.045	1,99

Alokasi anggaran alokasi DIPA non teknis untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.
2. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2018 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung.
3. Penurunan pada anggaran belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikarenakan penurun anggaran untuk belanja modal Mahkamah Agung.

Adapun perbandingan anggaran serta realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun anggaran 2018, 2017 dan 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

SATKER	2018			2017			2016		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	12.686.042.000	12.661.383.480	99	13.511,093,000	13,331,430,766	99	17,002,550,000	16,922,396,469	100
PA Jambi	10.956.350.000	10.739.405.251	98	10,207,310,000	10,160,698,355	100	9,926,073,000	9,761,027,658	98
PA Sengeti	4,144,591,000	4,089,690,248	98	5,228,383,000	4,371,007,107	84	4,520,219,000	4,262,952,711	94
PA Kuala Tungkal	3,306,605,000	3,164,267,685	95	3,541,421,000	3,432,134,121	97	3,582,726,000	3,337,687,676	93
PA Muara Sabak	2,810,044,000	2,714,501,097	96	3,089,877,000	2,957,535,767	96	3,441,567,000	3,337,426,835	97
PA Muara Bulian	4,476,187,000	4,399,220,595	98	4,955,985,000	4,896,888,527	99	4,263,810,000	4,148,084,200	97
PA Muara Tebo	2,533,827,000	2,486,581,105	98	2,556,306,000	2,394,855,773	94	3,322,232,000	3,119,304,104	94
PA Muara Bungo	3,010,322,000	2,806,959,140	93	3,052,128,000	3,017,085,133	99	3,112,235,000	2,981,800,824	96

PA Sarolangun	2,749,227,000	2,690,591,524	97	2,611,029,000	2,380,936,298	91	3,415,334,000	2,947,754,365	86
PA Bangko	2,994,149,000	2,947,066,518	98	3,165,392,000	2,942,742,776	93	4,468,435,000	3,598,448,045	81
PA Sungai Penuh	3,890,922,000	3,754,354,312	96	3,805,816,000	3,723,204,048	98	4,050,395,000	3,731,816,667	92

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama mengelola Belanja Negara dengan klasifikasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Adapun gambaran anggaran dan realisasinya pada tahun 2018 pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama dibawahnya adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja pegawai berjumlah Rp. 42.710.252.000,- (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu). Jumlah ini menurun 13,6 % dari tahun 2017 yang berjumlah Rp. 43.622.545.000,- (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu). Berikut tabel dan grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tabel 3.14
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	SATKER	PAGU	REALISASI		SISA	
			Rp	%	Rp	%
1	PTA Jambi	10.799.878.000	10.775.335.382	99,77	24.542.618	0,23
2	PA Jambi	9.955.865.000	9.756.948.676	98,00	198.916.324	2,00
3	PA Muara Bulian	3.461.806.000	3.387.866.894	97,86	73.939.106	2,14
4	PA Sengeti	3.332.655.000	3.279.670.265	98,41	52.984.735	1,59
5	PA Muara Bungo	2.202.231.000	2.008.355.774	91,20	193.875.226	8,80
6	PA Muara Tebo	1.912.259.000	1.899.595.551	99,34	12.663.449	0,66
7	PA Sarolangun	1.927.038.000	1.886.755.258	97,91	40.282.742	2,09
8	PA Bangko	2.159.792.000	2.125.593.648	98,42	34.198.352	1,58
9	PA Kuala Tungkal	2.322.167.000	2.248.596.653	96,83	73.570.347	3,17
10	PA Muara Sabak	2.134.525.000	2.101.196.842	98,44	33.328.158	1,56
11	PA Sungai Penuh	2.502.036.000	2.379.969.286	95,12	122.066.714	4,88
PTA dan PA se wilayah Jambi		42.710.252.000	41.849.884.229	97,99	860.367.771	2,01

Grafik 3.2
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa penurunan anggaran terjadi karena hal sebagai berikut:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.
2. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2018 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung untuk tidak mengalokasikan mengingat kondisi jumlah anggaran yang menurun.

Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2018, realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 96 % dengan nilai sebagai berikut:

Total Pagu 2018	:	Rp. 42.710.252.000,-
Realisasi Tahun 2018	:	Rp. 41.849.884.229,-
Sisa	:	Rp. 860.367.771,-

Nilai ini secara persentase meningkat namun dilihat dari nominalnya menurun dibandingkan dengan penyerapan tahun anggaran 2017 dengan nilai sebagai berikut:

Total Pagu 2017	:	Rp. 43.622.545.000,-
Realisasi Tahun 2017	:	Rp. 41.804.891.548,-
Sisa	:	Rp. 1.817.653.452,-
Total Pagu 2016	:	Rp. 50.501.477.000,-
Realisasi Tahun 2016	:	Rp. 47.733.925.474,-
Sisa	:	Rp. 2.767.551.526,-

Kondisi ini dikarenakan penurunan pada jumlah pegawai terutama Hakim Tk Banding dan Hakim Tk. Pertama yang menyebabkan penurunan penyerapan belanja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi.

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.15
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Per Satuan Kerja

SATKER	2018			2017			2016		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	10.799.878.000	10.775.335.382	99	11.781.794.000	11.610.989.420	99	15.447.056.000	15.366.981.121	99
PA Jambi	9.955.865.000	9.756.948.676	98	9.080.950.000	9.042.993.705	100	9.129.879.000	8.965.532.058	98
PA Sengeti	3.332.655.000	3.279.670.265	98	4.302.822.000	3.448.086.400	80	3.707.203.000	3.453.185.714	93
PA Kuala Tungkal	2.322.167.000	2.248.596.653	96	2.413.625.000	2.336.453.108	97	2.903.456.000	2.664.730.710	92
PA Muara Sabak	2.134.525.000	2.101.196.842	98	1.941.358.000	1.908.176.167	98	2.596.600.000	2.504.441.967	96
PA Muara Bulian	3.461.806.000	3.387.866.894	98	3.349.762.000	3.295.839.571	98	3.205.409.000	3.101.447.950	97
PA Muara Tebo	1.912.259.000	1.899.595.551	99	1.637.738.000	1.514.313.615	92	2.402.165.000	2.210.451.491	92
PA Muara Bungo	2.202.231.000	2.008.355.774	91	2.280.717.000	2.250.769.333	99	2.339.805.000	2.233.321.962	95
PA Sarolangun	1.927.038.000	1.886.755.258	98	1.771.820.000	1.566.143.868	88	2.585.031.000	2.146.334.765	83
PA Bangko	2.159.792.000	2.125.593.648	98	2.103.539.000	1.913.656.751	91	3.071.450.000	2.247.273.369	73
PA Sungai Penuh	2.502.036.000	2.379.969.286	95	3.113.423.000	2.840.224.367	91	2.977.213.000	2.963.550.862	100
Jumlah	42.710.252.000	41.849.884.229	98	50.501.477.000	47.733.925.474	95	48.475.665.000	48.076.837.244	99

Belanja Barang

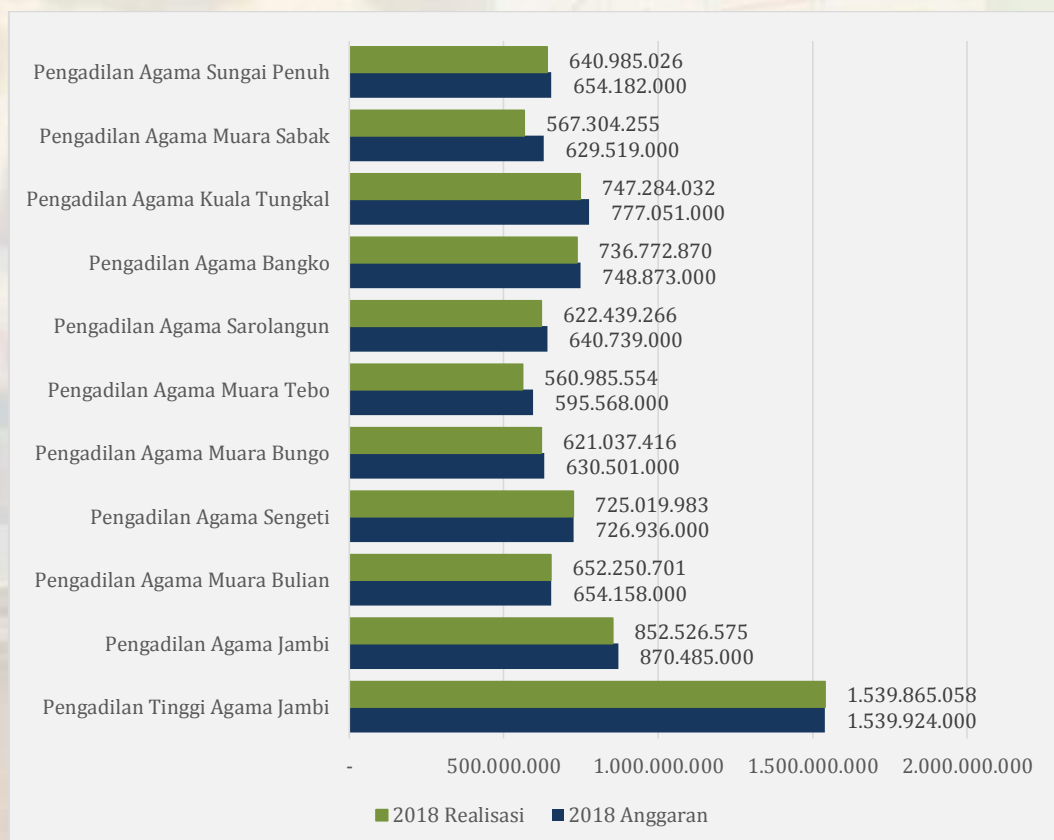
Belanja Barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja barang berjumlah Rp. 8.467.936.000,- (delapan milyar empat ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Jumlah ini menurun 1,5 % dari tahun 2017 yang berjumlah Rp. 8.596.805.000,- (delapan milyar lima ratus

Sembilan puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah). Relatif sama nilai anggaran Belanja Barang tahun 2018 dan 2017 ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Tidak ada perubahan yang signifikan anggaran belanja barang berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2018
2. Efisiensi biaya konsumsi rapat dikantor yang tidak lagi menyediakan anggaran untuk biaya makan siang.
3. Efisiensi biaya perjalanan dinas dalam kota yang tidak memberikan uang transport kepada pegawai yang memegang kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Grafik 3.3
Pagu dan Realisasi Belanja Barang
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2018, realisasi penyerapan anggaran belanja barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 97 % dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2018 : Rp. 8,467.936.000,-
 Realisasi Tahun 2018 : Rp. 8,266.470.736,-
 Sisa Anggaran : Rp. 201.465.264,-

Nilai ini secara persentase sama dengan capaian realisasi pada tahun 2018 dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2017 dan 2016 sebesar 97% dan 98% dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Barang 2017 : Rp. 8.596.005.000,-
 Realisasi Tahun 2017 : Rp. 8.304.087.745,-
 Sisa Anggaran : Rp. 292.717.255,-
 Pagu Belanja Barang 2016 : Rp. 6.864.917.000,-
 Realisasi Tahun 2016 : Rp. 6.680.732.721,-
 Sisa Anggaran : Rp. 184.184.279,-

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.16
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang Per Satuan Kerja

SATKER	2018			2017			2016		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	1,539,924,000	1,539,865,058	100	1,558,299,000	1,549,481,346	99	1,369,494,000	1,369,430,348	100
PA Jambi	870,485,000	852,526,575	98	889,360,000	880,994,650	99	680,985,000	636,889,676	94
PA Sengeti	726,936,000	725,019,983	99	750,061,000	747,672,707	100	577,516,000	574,381,997	99
PA Kuala Tungkal	777,051,000	747,284,032	96	784,296,000	752,181,013	96	605,430,000	581,678,153	96
PA Muara Sabak	629,519,000	567,304,255	90	638,019,000	538,859,600	84	530,972,000	486,842,300	92
PA Muara Bulian	654,158,000	652,250,701	99	664,783,000	663,653,956	100	485,945,000	475,152,613	98
PA Muara Tebo	595,568,000	560,985,554	94	603,568,000	565,556,658	94	461,270,000	455,069,966	99

PA Muara Bungo	630,501,000	621,037,416	98	636,411,000	631,430,300	99	494,194,000	493,606,800	100
PA Sarolangun	640,739,000	622,439,266	97	648,209,000	623,892,430	96	540,841,000	529,569,500	98
PA Bangko	748,873,000	736,772,870	98	756,353,000	723,794,185	96	593,967,000	582,151,868	98
PA Sungai Penuh	654,182,000	640,985,026	98	667,446,000	626,570,900	94	524,303,000	495,959,500	95
Jumlah	8,467,936,000	8,266,470,736	97	8,596,805,000	8,304,087,745	97	6,864,917,000	6,680,732,721	97

Belanja Modal

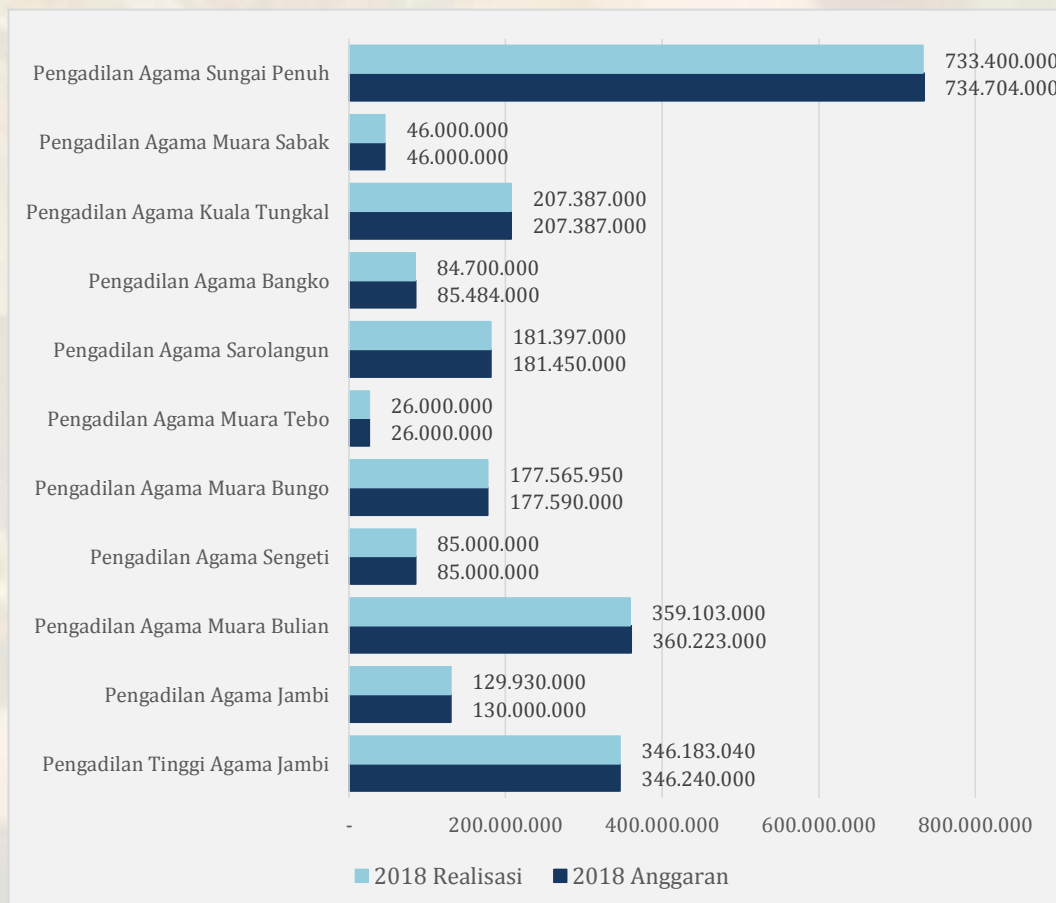
Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, anggaran belanja modal tahun 2018 berjumlah Rp. 2.380.078,000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah). Jumlah ini menurun 32% dari tahun 2017 yang berjumlah Rp. 3,505,390,000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Kegiatan belanja modal pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi bertujuan untuk:

1. Peningkatan anggaran belanja modal yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terutama untuk pelayanan publik.
2. Pengalokasian anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Grafik 3.4
Pagu dan Realisasi Belanja Modal
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi



Dari anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2018, realisasi penyerapan anggaran belanja modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi mampu menyerap anggaran sebesar 99% dengan nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2018	:	Rp.	2.380.078,000,-
Realisasi Tahun 2018	:	Rp.	2.376.665.990,-
Sisa	:	Rp.	3.412.010,-

Nilai ini sama dengan persentase realisasi penyerapan tahun anggaran 2017 dan 2016 sebesar 99% dengan rincian nilai sebagai berikut:

Pagu Belanja Modal 2017	:	Rp.	3.734.041.359,-
Realisasi Tahun 2017	:	Rp.	3.734.041.359,-
Sisa	:	Rp.	5.140.641,-

Pagu Belanja Modal 2016 : Rp. 3.734.041.359,-
 Realisasi Tahun 2016 : Rp. 3.734.041.359,-
 Sisa : Rp. 5.140.641,-

Rincian pagu dan realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.17
Rincian Pagu dan Penyerapan Anggaran Belanja Modal Per Satuan Kerja

SATKER	2018			2017			2016		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	346,240,000	346,183,040	99	171,000,000	170,960,000	100	517,560,000	517,066,750	100
PA Jambi	130,000,000	129,930,000	99	237,000,000	236,710,000	100	434,122,000	433,700,000	100
PA Sengeti	85,000,000	85,000,000	100	175,500,000	175,248,000	100	302,000,000	301,888,800	100
PA Kuala Tungkal	207,387,000	207,387,000	100	343,500,000	343,500,000	100	306,000,000	305,460,100	100
PA Muara Sabak	46,000,000	46,000,000	100	510,500,000	510,500,000	100	218,000,000	217,887,000	100
PA Muara Bulian	360,223,000	359,103,000	99	941,440,000	937,395,000	100	716,000,000	714,285,000	100
PA Muara Tebo	26,000,000	26,000,000	100	315,000,000	314,985,500	100	235,500,000	235,385,000	100
PA Muara Bungo	177,590,000	177,565,950	99	135,000,000	134,885,500	100	251,000,000	250,833,000	100
PA Sarolangun	181,450,000	181,397,000	99	191,000,000	190,900,000	100	406,000,000	404,750,000	100
PA Bangko	85,484,000	84,700,000	99	305,500,000	305,291,840	100	167,000,000	166,800,709	100
PA Sungai Penuh	734,704,000	733,400,000	99	179,950,000	179,163,538	100	186,000,000	185,985,000	100
Jumlah	2,380,078,000	2,376,665,990	99	3,505,390,000	3,499,539,378	99	3,739,182,000	3,734,041,359	99

b. Pengelolaan DIPA Badan Urusan Administrasi (04)

Dalam rangka pengelolaan keuangan yang baik, maka Mahkamah Agung RI mengambil kebijakan pemisahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan yaitu dalam proses penyelesaian perkara. Untuk Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi, DIPA tersebut

dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

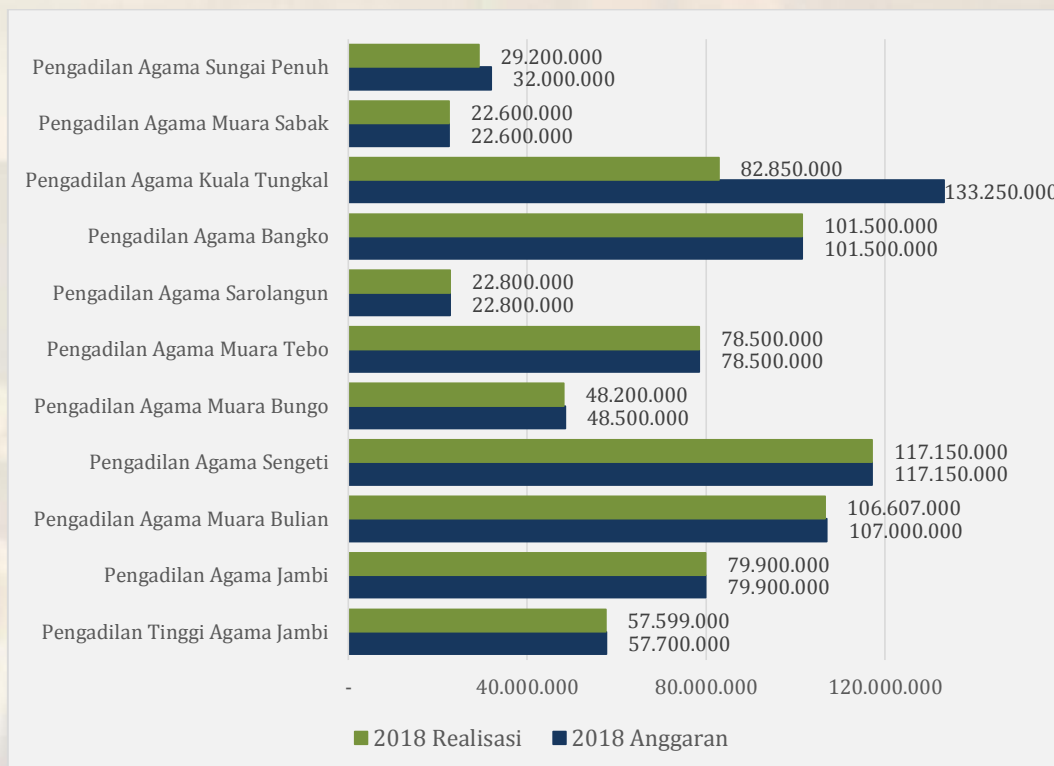
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tk Banding ke Pengadilan Tk Pertama dalam rangka peningkatan manajemen Peradilan Agama.
2. Kegiatan asistensi dan assessment akreditasi penjamin mutu peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk terciptanya pelayanan prima terhadap para pencari keadilan.
3. Pengalokasian dana untuk pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi yang mengajukan gugatan ke Pengadilan melalui program Perkara Prodeo
4. Pengalokasian dana untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dimana penyelenggaraan sidang dilakukan di tempat yang jarak tempuhnya sulit dijangkau masyarakat melalui program Sidang Keliling. Selain itu, siding di luar gedung juga digunakan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang belum tercatat pernikahannya melalui program terpadu pelaksanaan Itsbat Nikah.
5. Pengalokasian dana untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu melalui program POSBAKUM.
6. Pengalokasian dana untuk perjalanan dinas bagian Kepaniteraan dalam rangka konsultasi ke Pengadilan Tk Banding.
7. Pengalokasian dana untuk Koordinator Wilayah Pengelola DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama.

Alokasi anggaran DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta seluruh satuan kerja dibawahnya pada tahun 2018 ini yaitu sebagai berikut:

Total Pagu 2018	:	Rp.	800.900,000,-
Realisasi anggaran 2018	:	Rp.	746.906,000,-
Sisa	:	Rp.	53.994.000,-

Berikut grafik alokasi pagu anggaran dan realisasi untuk Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Grafik 3.5
Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 04
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi



Alokasi anggaran alokasi DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun perbandingan anggaran serta realisasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun anggaran 2018, 2017 dan 2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.18
Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 Tahun 2018, 2017, 2016
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

SATKER	2018			2017			2016		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
PTA Jambi	57,700,000	57,599,000	99	61,700,000	61,700,000	100	58,100,000	58,100,000	100

PA Jambi	79,900,000	79,900,000	100	122,500,000	118,200,000	96	154,100,000	153,410,000	100
PA Sengeti	117,150,000	117,150,000	100	67,000,000	67,000,000	100	68,500,000	68,440,000	100
PA Kuala Tungkal	133,250,000	82,850,000	62	64,750,000	64,750,000	100	79,750,000	79,357,000	100
PA Muara Sabak	22,600,000	22,600,000	100	24,850,000	24,850,000	100	27,400,000	27,100,000	99
PA Muara Bulian	107,000,000	106,607,000	99	66,200,000	66,200,000	100	70,700,000	70,525,000	100
PA Muara Tebo	78,500,000	78,500,000	100	36,500,000	36,500,000	100	38,000,000	37,776,000	99
PA Muara Bungo	48,500,000	48,200,000	99	28,500,000	28,400,000	100	30,000,000	28,580,000	95
PA Sarolangun	22,800,000	22,800,000	100	21,750,000	21,750,000	100	24,300,000	24,300,000	100
PA Bangko	101,500,000	101,500,000	100	92,000,000	92,000,000	100	107,000,000	107,000,000	100
PA Sungai Penuh	32,000,000	29,200,000	91	36,000,000	33,524,000	93	37,500,000	37,005,000	99
Jumlah	800,900,000	746,906,000	93	621,750,000	614,874,000	99	695,350,000	691,593,000	99

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut program keterbukaan informasi pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Penggunaan Teknologi Informasi sudah melangkah ke modernisasi dan sudah berjalan dengan pesat. Di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi penerapannya pun sudah cukup baik. SDM yang dimiliki juga berangsur-angsur mulai memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Keadaan ini tentunya cukup mendukung penyelesaian perkara namun belum begitu maksimal.

Dalam mengelola teknologi informasi terkait SIPP Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi saat ini telah memiliki perangkat keras (hardware) berupa server, laptop, PC, Printer yang sudah terstandar oleh ketentuan Mahkamah Agung RI. Dan perangkat lunak (software) berupa sistem operasi linux centos 7.

Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi telah menggunakan SIPP versi 3.2.0-5 yang mana aplikasi SIPP versi 3.2.0-5 telah terintegrasi ke dalam direktori putusan dan adanya menu delegasi (tabayun online).

- **Publikasi Perkara (One Day One Publish)**

One Day Publish merupakan maklumat pelayanan kepada publik, dimana mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan berita acara hingga putusan telah menggunakan aplikasi SIPP versi 3.2.0-5 yang telah terintegrasi ke dalam direktori putusan. Yang mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi telah melaksanakannya.

F. Regulasi Tahun 2018

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor : W5-A/103.a/OT.01.3/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Tata tertib Kedinasan Pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/97/KP.02.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Penganggung Jawab Absensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/137.b/HM. 02.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/137.a/HM.02.1/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Pengelola Website (Dokumentasi dan Publikasi kegiatan);
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/302/OT. 01.2/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi SAKIP tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/53.a/HM. 02/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Petugas Arsip PTA Jambi;

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/01.a/HM.01.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/54.a/KP.04.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Petugas Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
9. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/94/PL.06/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan penanggung jawab penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
10. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/95/PL.06/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan penanggung jawab penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
11. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/120/PL.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Penghunian Rumah dinas Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
12. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/129/PL.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Pengguna/Pemakai dan Penanggung Jawab Laptop Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
13. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/136/PL.06/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Pengguna/Pemakai dan Penanggung Jawab Kamera Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
14. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/55.a/KU.01.1/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Petugas Penyimpan Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
15. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/113.a/KU.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

16. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/112.a/KU.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan dan Pengangkatan PPK, PPSPM, dan Staf Pengelola Anggaran Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/115.a/KU.01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
18. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/114.a/KU.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Penerima Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
19. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor : W5-A/683.a/KU.00/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang penunjukan tim penyusunan Laporan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
20. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/485/HM. 02.3/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
21. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/487.b/HM. 00/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Jenis Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
22. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/485.a/PS/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Standar Layanan Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
23. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/675/HK.05/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Petugas Penerimaan Berkas Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
24. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/129.a/HK.05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses dan Pembuat Komitmen Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

25. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/128.a/HK.00/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penggunaan Biaya Proses Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
26. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/127.a/HK.05/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan staf pelaksana Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
27. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/579.a/HK.05/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Pengelola Biaya ATK Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
28. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/487.a/PS/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penunjukan Tim Penangan Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
29. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/486/HM/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
30. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/486.a/PS/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
31. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/486.b/HK. 05/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Standard Layanan Pengaduan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;
32. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/769.a/PP.00.1/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
33. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/780.a/OT.1.3/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Rencana Kerja Penerapan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

- 
34. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/143.a/HM. 02.3 /I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Tim Publikasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
35. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/788/PS /VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Organisasi Pembinaan Dan Pengawasan dan Penunjukan Hakim Tinggi Pembina Dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018;

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya pengawasan internal diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan internal diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan internal tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan internal juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Berdasarkan keputusan tersebut, pengawasan internal meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

❖ Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi berada pada: Pimpinan, Hakim Tinggi Pengawas Bidang, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Adapun Hakim Tinggi Pengawas Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, berdasarkan Surat Keputusan Nomor W5-A/1008/PS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sebagai penanggung jawab hakim tinggi pengawas bidang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Koordinator pelaksanaan teknis dan memimpin dalam pengawasan dan pembinaan serta membuat hasil pembinaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Pengawasan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilakukan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Tabel. 4.1
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

NO	NAMA	BIDANG
1	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Koordinator
2	Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.	Administrasi Perkara
3	Drs. M. Nasir Daud	Administrasi Persidangan
4	Drs. H. Abd Rahman Usman, S.H.	Administrasi Penyelesaian Perkara
5	Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H.	Administrasi Umum Kepegawaian
6	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.	Administrasi Umum Keuangan
7	Drs. H. Mas'ud	Administrasi Umum Inventaris, Persuratan dan Perpustakaan
8	Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H.	Manajemen Pengadilan dan Pelayanan Publik (Struktur organisasi, Job Desk, perencanaan dan Koordinasi)
9	Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.	Manajemen Pengadilan dan Pelayanan Publik (Sistem Informasi, Evaluasi pelaksanaan kegiatan, pertanggung jawabab tupoksi)
10	Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.	Manajemen Pengadilan dan Pelayanan Publik (Organisasi kedinasan, organisasi non kedinasan, program kerja, visi dan misi)
11	Drs. Moch. Syar'i Effendy, S.H	Pengadaan Barang dan Jasa

Sedangkan untuk susunan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	NAMA	BIDANG
1	Drs. Moch Syar'i Effendy, S.H Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H (asisten) Nur Mulyanti, S.H., M.H	Pengadilan Agama Jambi
2	Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.SI Dra Hj Ummi Kalsum, M.H (Asisten)	Pengadilan Agama Sengeti
3	Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H Hj. Yahidah, S.H., M.H (Asisten)	Pengadilan Agama Muara Sabak
4	Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H Drs. Namlis, S.H (Asisten)	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
5	Drs. H. Mas'ud. Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H	Pengadilan Agama Muara Bulian
6	Drs. H. Zaenal Hakim, S.H Mawardi, S.H., M.H (Asisten)	Pengadilan Agama Muara Tebo
7	Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M. ESy Baharuddin Djalil, S.H (Asisten)	Pengadilan Agama Muara Bungo
8	Drs. M. Nasir Daud Faizal, S.H., M.H (Asisten)	Pengadilan Agama Sarolangun
9	Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H Drs. Zubir Ishak, M.H (Asisten)	Pengadilan Agama Bangko
10	Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H Drs. Aidil Mujahid (Asisten)	Pengadilan Agama Sungai Penuh

❖ Pengawasan Fungsional

Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan adanya Pengawasan Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3)

“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”.

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Pada tahun 2018 Pembinaan dan Pengawasan yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/1008/PS/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan dilengkapi dengan surat tugas ke masing-masing satuan kerja yang dikeluarkan oleh pejabat terkait.

Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan

Untuk tahun 2018 pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara terjadwal sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

NO	TEMPAT	TANGGAL	PETUGAS
1	Pengadilan Agama Jambi	24 s.d. 25 April 2018	1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. 2. Drs. M. Nasir Daud 3. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. 4. Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H. 5. Henry Hanafi, S.H., M.H. 6. Mawardi, S.H., M.H. 7. Nur Mulyanti, S.H., M.H. 8. Sahril, S.H., M.H. 9. H. Idris Latif, S.H., M.H. 10. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H. 11. Drs. Jumaani Soleh 12. Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy. 13. M. Ukbah Rizal, S.Kom
2	Pengadilan Agama Sengeti	24 s.d. 25 April 2018	1. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.Hum 2. Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H. 3. Drs. H. Muslim, S.H., M.H. 4. Drs. H. S. Syekhan Al Jufri 5. Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum, M.H. 6. Tri Wahyunim, S.Kom, M.H.

			7. Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H. 8. Enita, S.H. 9. Widianingsih, A.Md. 10. Imron Hidayat, S.Kom
3	Pengadilan Agama Muara Bulian	5 s.d. 6 April 2018	1. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.Hum 2. Drs. H. S. Syekhan Al Jufri 3. Drs. M. Nasir Daud 4. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I 5. Sahril, S.H., M.H. 6. Mawardi, S.H., M.H. 7. Nur Mulyanti, S.H., M.H. 8. Syapruddin, S.Ag. 9. Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy. 10. Panca Indriatari, A.Md.
4	Pengadilan Agama Muara Sabak	9 s.d. 10 April 2018	1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. 2. Drs. H. Muslim, S.H., M.H. 3. Drs. Moh. Syar'I Effendy, S.H. 4. Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. 5. Dian Sari Wulandari, S.Ag. 6. Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum, M.H. 7. Muthiya Sari, S.Sos., M.H. 8. Gusmi Yanti Fitriani, S.H. 9. Vina Amrina
5	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	11 s.d. 13 April 2018	1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. 2. Drs. Moh. Syar'I Effendy, S.H. 3. Drs. H. Muslim, S.H., M.H. 4. Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H. 5. Hj. Yahidah, S.H., M.H. 6. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H. 7. M. Ukbah Rizal, S.Kom
6	Pengadilan Agama Sarolangun	2 s.d. 3 April 2018	1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. 2. Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H. 3. Drs. Mas'ud 4. Drs. Namlis, M.H. 5. Drs. Aidil Mujahid 6. H. Idris Latif, S.H., M.H. 7. Ahmad Ghufuran, S.E., M.M.
7	Pengadilan Agama Muara Tebo	2 s.d. 4 April 2018	1. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.Hum 2. Drs. H. S. Syekhan Al Jufri 3. Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I 4. Drs. Zubir ishak, M.H. 5. Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H. 6. Budi Barliansyah, S.E. 7. H. Zainal Abidin, S.Ag.
8	Pengadilan Agama Muara Bungo	4 s.d. 6 April 2018	1. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. 2. Drs. Mas'ud 3. Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H. 4. Drs. Aidil Mujahid 5. Drs. Namlis, M.H. 6. H. Idris Latif, S.H., M.H. 7. Ahmad Ghufuran, S.E., M.M.
9	Pengadilan Agama Bangko	8 s.d. 10 April 2018	1. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.Hum 2. Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H. 3. Drs. Asri Damsy, S.H., M.H. 4. Faizal, S.H., M.H. 5. Baharuddin Djalil, S.H. 6. Drs. Jumaani Soleh 7. Rovel Rinaldi, S.H.I., M.H.I.

10	Pengadilan Agama Sungai Penuh	11 s.d. 13 April 2018	1. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.Hum 2. Drs. H. Entang Mahmud Aziz, S.H. 3. Drs. Asri Damsy, S.H., M.H. 4. Faizal, S.H., M.H. 5. Baharuddin Djalil, S.H. 6. Drs. Jumaani Soleh 7. Rovel Rinaldi, S.H.I., M.H.I.
----	-------------------------------	-----------------------	--

Dalam pelaksanaannya, apabila tim pembinaan dan pengawasan tersebut menemukan kesalahan-kesalahan maka diadakan kontrak kerja terhadap Pengadilan Agama tersebut serta dievaluasi sesuai dengan tanggal berakhirnya masa kontrak kerja tersebut oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

B. Evaluasi

Untuk melihat hasil dari kinerja apakah meningkat atau menurun maka dilaksanakan evaluasi. Evaluasi merupakan tolak ukur dari kinerja setiap instansi atau lembaga pemerintahan yang akan menentukan hasil yang telah dicapai atau yang akan dicapai.

Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi kinerja kegiatan setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya sesuai dengan atribut indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya.

Program dan kegiatan yang dievaluasi seharusnya merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis instansi yang bersangkutan. Bagi instansi pemerintah yang bersangkutan evaluasi yang dilakukan harus merujuk kepada indikator kinerja yang telah ditetapkannya, baik itu Input, Proses, Output, Outcome, Benefit dan Impactnya, dan pula capaiannya.

Evaluasi Program adalah suatu cara yang membawa kepada keputusan publik dengan didasarkan kepada adanya pengetahuan mengenai masalah, keefektifan dari

strategi sebelumnya dalam mengurangi permasalahan, dan observasi terhadap keefektifan program tertentu. Selain itu evaluasi program dapat diartikan sebagai suatu penilaian terhadap output program dan penilaian terhadap program yang diinginkan/tujuan. Evaluasi program atau penelitian evaluasi antara lain bertujuan untuk:

1. Perbaiki Program
2. Mendukung program yang sedang berjalan
3. Menyelidiki/mengaudit program untuk mencari dimana letak terjadinya kesalahan jika program gagal
4. Menghapuskan program jika program justru berdampak negative

Dikantor Pengadilan Tinggi Agama Jambi evaluasi dilaksanakan melalui Rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk memonitor sekaligus mengevaluasi pencapaian program-program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan perbulan, pertriwulan, persemester dan setiap akhir tahun. Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan tenaga kontrak kurun waktu tahun 2018 telah dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pegawai dan tenaga honorer dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melaksanakan rapat bulanan bidang kepaniteraan/kesekretariatan setiap minggu ke empat setiap bulan.
2. Melaksanakan rapat bulanan seluruh pegawai dan tenaga honorer minggu pertama setiap bulan.
3. Melaksanakan DDTK secara insedentil.
4. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai dan tenaga honorer.
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai dalam bentuk DP3 pada akhir tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan menganalisa tugas-tugas dan pencapaian Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berupaya maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, meskipun masih dapat beberapa hambatan.
2. Penggunaan anggaran yang tersedia di dalam DIPA 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi, baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan telah dikelola sesuai dengan tata kelola dan aturan yang berlaku.
4. Sisa Perkara Tahun 2017 sebanyak 1 Perkara dan Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi periode tahun 2018 sebanyak 34 sedangkan dan telah diputus sebanyak 33 perkara (94,28%) sehingga masih ada sisa 2 perkara.

B. Saran

Untuk menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang diidentifikasi berdasarkan keadaan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan untuk peningkatan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohon mengupayakan penambahan pegawai sesuai dengan volume / beban tugas Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Kepada pimpinan Mahkamah Agung RI dimohonkan untuk meningkatkan Anggaran Rutin sehingga setiap pelaksanaan program kerja dapat ditingkatkan
3. Proyek pembangunan gedung kantor dan pengadaan sarana prasarana lainnya termasuk pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) perlu terus menerus ditingkatkan sesuai standar ideal masing-

masing Pengadilan Agama demi kelancaran tugas untuk meningkatkan kewibawaan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

4. Kepada seluruh ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar lebih meningkatkan target penyelesaian perkara dan memperkecil sisa perkara.
5. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim, Pegawai Kepaniteraan dan pegawai lainnya perlu terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil, menjalankan dibidang tugasnya dan berahlak mulia).

